RESPON POLITIK PEMUDA TERHADAP HEGEMONI DINASTI POLITIK KUAM SARUNGAN DI BANGKALAN MADURA

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Dirasah Islamiyah

Oleh:
M. SO'IM
NIM: F520915019

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

PENULISAN TESIS

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : M. SO'IM

Nim : F520915019

Program : MAGISTER (S-2)

Institusi : PASCASARJANA UIN SUNAN AMPEL

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Tesis ini tidak pernah dikumpulkam kepada lembaga pendidikan tinggi mana pun untuk mendapatkan gelar akademik apapun
2. Tesis ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan hasil plagiasi atas karya orang lain
3. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini sebagai hasil plagiasi, saya akan bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 28 Pebruari 2018

Yang Menyatakan,

METERAI TEMPEL

072E0AFF668613367

6000

ENAM RIBU RUPIAH

(M. So'im)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : **M. So'im**

NIM : **F520915019**

Program Studi : **Konsentrasi Dirasah Islamiah Kepemudaan**

Judul : **Respon Politik Pemuda terhadap Hegemoni Dinasti Politik Kaum Sarungan di Bangkalan Madura**

Tesis ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Surabaya, 28 Pebruari 2018

Dosen Pembimbing,

Dr. H. Suis, M. Fil. I.
NIP.196201011997031002

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis M. So'im ini telah di uji

pada tanggal 16 januari 2019

Tim Penguji:

1. **Dr. H. Suis, M. Fil. I. (Ketua Penguji)** .....
   NIP.196201011997031002
2. **Prof. Dr. H. Husein Aziz, M.Ag (Penguji Utama)** .....
   NIP. 195601031985031002
3. **Dr. Abdul Basith Junaidi, M.Ag (Penguji)** .....
   NIP. 197110212001121002

Surabaya, 12 April 2019

Direktur,

Prof. Dr.H. Aswadi,M.Ag

NIP.196004121994031001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. So'im
NIM : F520915019
Fakultas/Jurusan : Dirasah Islamiyah
E-mail address :

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Sekripsi ☑ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Respon Politik Pemuda Terhadap Hegemoni Dinasti Politik Kaum Sarungan di Bangkalan Madura

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 29 April 2019

Penulis

(M. So'im)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

M. So'im, F520915019, 2018. Respon Politik Pemuda terhadap Hegemoni Dinasti Politik Kaum Sarungan di Bangkalan Madura. Tesis Konsentrasi Dirasah Islamiah Kepemudaan Program Pascasarjana Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya.

Kata Kunci : Pemuda, Hegemoni, Kaum Sarungan, Bangkalan

1. Ada tiga persoalan yang akan dikaji oleh penulis dalam tesis ini yaitu: (1) Bagaimana Teori hegemoni yang dilakukan dinasti politik kaum sarungan terhadap politik pemuda (2), Bagaimana penerapan tori hegemoni terhadap hegemoni dinasti politik kaum sarungan? (3) Bagaiman respon politik pemuda terhadap hegemoni dinasti politik kaum sarungan?

Dalam persoalan tersebut, dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan etnografi, yang berguna untuk mengungkapkan fakta dan data, sedangkan jenis penelitiannya adalah kualitatif yang dimaksudkan untuk mendesripsikan dan menganalisis tindakan-tidakan hegemoni dinasti terhadap masyarakat serta respon para pemudanya yang merupakan intelektual organik.. Sesuai jenis penelitian, maka tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian ini peneliti menemukan beberapa hal: pertama; peneliti undang-undang desentralisasi telah membuka kesempatan bagi orang yang berpengaruh di tingkat lokal untuk memenangkan kontestasi. Kedua; dinasti politik kaum sarungan menjadi trah tak tergantikan dalam memimpin Bangkalan selama dua dekade. Dan yang ketiga; respon yang dilakukan oleh para politik pemuda terhadap hegemoni dinasti politik kaum sarungan berupa edukasi politik dan advokasi yang diaktualisasikan dalam berbagai kegiatan dan sosialisasi.

Bertilik tolak dari penelitian ini, yang hanya mengungkap aspek hegemoninya saja, maka peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya menjelaskan bagaimana aspek-aspek dari sisi yang lain ikut mempengaruhi perspektif atau cara pandang masyarakat Bangkalan. Seperti misalnya dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aspek dominasi dalam hal ini penggunaan kekerasan fisik yang dilakukan oleh dinasti politik kaum sarungan. Karena dalam tinjauan singkat penulis di Bangkalan, sisi tersebut sedikit ataupun banyak ikut mempengaruhi jalannya politik di Bangkalan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ii

PERNYATAAN KEASLIAN iii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iv

PENGESAHAN TIM PENGUJI v

MOTTO DAN PERSEMBAHAN vi

ABSTRAK vii

KATA PENGANTAR ix

DAFTAR ISI xi

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 7

C. Rumusan Masalah 7

D. Tujuan Penelitian 8

E. Manfaat Penelitian 8

F. Penelitian Terdahulu 9

G. Kerangka Teoritis 11

H. Metode Penelitian 18

1. Jenis Penelitian 19
2. Data yang Dikumpulkan 20
3. Sumber Data 21
4. Tehnik Pengumpulan Data 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik Pengolahan Data 22

6. Teknik Analisa Data 24

I. Sistematika Pembahasan 25

BAB II : PROGRAM POLITIK PEMUDA DI BANGKALAN 27

A. Sekilas Tentang Pemuda..... 27

B. Program Politik Pemuda 32

C. Pelaksanaan Program Politik Pemuda 39

BAB III : HEGEMONI POLITIK KAUM SARUNGAN DI BANGKALAN

A. Pemerintahan 41

B. Organisasi Sosial Kemasyarakatan 66

C. Kekuasaan Ekonomi 69

BAB IV: RESPON POLITIK PEMUDA TERHADAP HEGEMONI DINASTI POLITIK KAUM SARUNGAN..... 81

A. Respon Politik Pemuda di Bangkalan 84

B. Hegemoni Politik Kaum Sarungan Di Bangkalan 86

C. Dampak Respon Politik Pemuda terhadap Hegemoni Dinasti Politik Kaum Sarungan 106

BAB V: PENUTUP 109

A. Simpulan..... 109

B. Saran 110

DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah telah membuktikan bahwasanya pemuda adalah salah satu pilar yang memiliki peran besar dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga maju mundurnya suatu negara sedikit banyak ditentukan oleh pemikiran dan kontribusi aktif dari pemuda di negara tresebut. Begitu juga dalam lingkup kehidupan bermasyarakat, pemuda merupakan satu identitas yang potensial dalam tatanan masyarakat sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan bangsa, karena pemuda sebagai harapan bangsa dapat diartikan bahwa siapa yang menguasai pemuda akan menguasai masa depan.[1]

Dasar Hukum Undang-undang tentang Kepemudaan terdapat dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27, pasal 28c, dan Pasal 31 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang tersebut antara lain mengatur mengenai segala aspek pelayanan kepemudaan yang berkaitan dengan koordinasi dan kemitraan, prasarana dan sarana, dan organisasi kepemudaan. Selain itu, juga memuat pengaturan mengenai peran serta masyarakat dalam pelayanan kepemudaan,

[1]Taufik Abdullah, *Pemuda dan Perubahan Sosial*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2001), 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberian penghargaan, pendanaan, serta akses pemodalan bagi kegiatan kewirausahaan pemuda secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan.[1]

Generasi muda adalah generasi penerus perjuangan bangsa dan pemegang estafet kepemimpinan bangsa, karena itu perlu kiranya dalam diri pribadi mereka ditanamkan nilai-nilai budaya bangsa yang telah diyakini kebenarannya, diterima, diikuti, dibela dan diperjuangkan. Pemuda sebagai generasi penerus juga memiliki kemampuan potensial yang bisa diolah menjadi kemampuan aktual.[2] Selain itu juga memiliki potensi kecerdasan intelektual, emosi dan sosial, berbahasa, dan kecerdasan seni yang bisa diolah menjadi kecerdasan aktual yang dapat membawa mereka kepada prestasi yang tinggi dan kesuksesan. Mereka memiliki potensi moral yang dapat diolah dan dikembangkan menjadi moral yang positif sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa dan negara yang penuh dengan kejujuran, tidak korup, semangat yang tinggi dan bertanggung jawab.

Pemuda adalah orang-orang yang masih produktif dalam kehidupan bermasyarakat, masih bisa diandalkan dalam berbagai kegiatan apapun, karena faktor-faktor biologis dan psikologis yang masih mendukung. Kondisi ideal pemuda sebagai generasi penerus bangsa, merupakan individu yang sedang berkembang, dan oleh karena itu perlu diberi kesempatan berkembang secara proporsional dan terarah, dan mendapatkan layanan pendidikan yang berimbang antara pendidikan pengetahuan umum dan pendidikan nilai moral

[1] Kemenpora. *Revitalisasi Organisasi Kepemudaan.* Jakarta: Kemenpora, 2010),39.

[2] *Ibid., 46*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta agama sebagai pedoman dalam bersikap dan bertingkahlaku di manapun mereka berada.[1]

Konsep tentang pemuda sesungguhnya memiliki makna yang kompleks, sehingga tidak jarang orang selalu mempermasalahkan definisi baku dari arti pemuda. Jadi dalam kesimpulannya bahwa kepemudaan adalah suatu konsep budaya sekaligus sebagai konsep politik. Akan tetapi definisi pemuda akan berbeda dari sudut pandang masing-masing ahli. Untuk itu definisi pemuda perlu dikesampingkan dari indikator usia. Pemuda yang merupakan motor aktif sosial masyarakat adalah individu-individu potensial untuk dibentuk dan digarap sebagai obyek sekaligus subyek serta merupakan mata rantai yang menghubungkan masa sekarang dan masa depan. Persepsi pemuda bukanlah suatu kata yang pengertiannya semata tergantung pada indikator usia, dan semangat. Jadi selama orang itu tanggap terhadap perkembangan dan mampu historis bangsa dan bernegara. Peranan pemuda pada masa itu selalu menempati posisis yang menentukan proses sosial politik dalam negara dan masyarakat. Mereka begitu tegar dalam memperjuangkan kemerdekaan, mengusir kolonialisme baik secara fisik maupun pemikiran.[2]

Salah satu langkah pemuda untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik adalah dengan partispasi aktif pemuda Indonesia dalam upaya pembangunan masyarakat. Pembangunan masyarakat menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah suatu proses melaui usaha dan prakarsa

---

[1] Taufik Abdullah, *Krisis Masa Kini dan Orde Baru*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), 56.

[2]Zada Khamami, *Dinamika Ideologi dan Politik Kenegaraan Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: Grapindo, 2010), 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat sendiri maupun kegiatan pemerintahan dalam rangka memperbaiki kondisi ekonomi, sosial, dan budaya. Berdasarkan defenisi yang dikeluarkan oleh PBB tersebut setidaknya ada dua peran pemuda dalam kaitannya dengan upaya pembagunan masyarakat. Yang pertama, pemuda sebagai pemrakarsa dari sekelompok masyarakat untuk bersama-sama dengan mereka melakukan upaya memperbaiki kondisi didalam masyarakat itu sendiri. Sedangkan yang kedua, pemuda bertindak sebagai fasilitator dari program-program yang digulirkan pemerintah dalam hal pembangunan masyarakat[1]. Khususnya di Bangkalan peranan pemuda sangat dibutuhkan sekali untuk melepaskan dari belenggu tirani yang sudah mencekam beberapa tahun ini.

Di sisi yang lain pondok pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan nonformal yang telah eksis sejak dulu kala bahkan sebelum pendidikan formal mulai dimasyarakatkan. Dalam perkembangannya, pendidikan pondok pesantren berubah sesuai dengan perkembangan zaman, melakukan adaptasi-adaptasi melalui perubahan kurikulum dan penambahan atau pengurangan mata pelajaran yang diajarkan di bilik-bilik kelas. Bahkan, beberapa sekolah formal merangkul pondok pesantren sebagai fitur tambahan untuk menarik perhatian wali murid dengan kebiasaan dan budaya pondok pesantren yang kental dengan nilai-nilai agama dan moralitas.

Pondok pesantren, sebagai sebuah realitas pendidikan yang eksis menciptakan pribadi-pribadi yang bersesuaian dengan norma-norma agama

[1] Wahyu Ishardino Satries, *Peran serta Pemuda dalam Membangun Masyarakat,* (Jurnal Madani Edisi I/Mei 2009), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan apa yang diharapkan oleh masyarakat secara umum terkait dengan nilai kebaikan, kejujuran, kesopanan, dan religiusitas dalam setiap tindakannya membuat lembaga pendidikan pondok pesantren dilirik sebagai sebuah lembaga pendidikan yang paling efektif untuk menciptakan individu dengan spesifikasi yang sesuai dengan harapan dan dambaan masyarakat secara luas (terutama masyarakat yang kental dengan ajaran-ajaran agama islam). Belum lagi, dewasa kini pondok pesantren eksis dengan berbagai macam bahan ajar tambahan yang diajarkan oleh lembaga-lembaga pendidikan formal seperti pengetahuan alam, pengetahuan sosial, dan mata pelajaran umum lainnya. Namun, hal tersebut juga berimpilasi pada beban yang diterima oleh para santri. [1]

Melihat pondok pesantren sebagai sebuah model lembaga pendidikan yang diidam- idamkan oleh masyarakat secara luas, kemudian membuat kita bertanya-tanya. Apakah benar pondok pesantren membentuk pribadi yang sesuai dan mempunyai spesifikasi yang pas dengan harapan masyarakat secara luas? Apakah benar pondok pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan yang melahirkan cendekiawan-cendekiawan yang mampu berpikir secara rasional atau justru melahirkan individu-individu yang hanya berfungsi sebagai mesin-mesin penghafal dan menerima segala bentuk pengetahuan yang menghegemoni? Apakah benar pondok pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan yang melahirkan orang-orang yang mampu menciptakan dan bertindak melakukan transformasi sosial, ataukah hanya menciptakan

[1] *Ibid., 30*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekumpulan manusia yang bahkan tak mempunyai kesadaran atas dirinya dan ketertindasannya?

Secara empiris, pondok pesantren justru mereproduksi kesenjangan, hegemoni, dan melakukan pembisuan atau pembungkaman terhadap pemikiran para santri melalui hubungan-hubungan yang kental akan stratifikasi sosial dan ajaran-ajaran yang dogmatis dan naratif. Dalam hal ini, realitas pondok pesantren menjadi sebuah fenomena yang unik untuk dikaji. Di satu sisi pondok pesantren menawarkan sebuah konsep pendidikan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap sosok penerus dan pemimpin di masa depan sesuai dengan kriteria-kriteria yang didasarkan atas prinsip moralitas yang kental dengan nilai-nilai religiusitas. Di sisi lain, pondok pesantren jika dilihat secara kritis justru melakukan penindasan dan kekerasan terhadap pemikiran para santri melebihi hanya untuk kepentingan-kepentingan sepihak.[1]

Fenomena-fenomena semacam ini juga terjadi di Bangkalan Madura di mana para kiainya dengan segala kharismatiknya membungkam para pemuda yang selaku pengkritik kebijakan pemerintah daerah yang tidak memihak pada rakyat. Hal tersebutlah yang menjadi perhatian penulis, sehingga tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam tulisan tesis yang berjudul RESPON POLITIK PEMUDA TERHADAP HEGEMONI DINASTI POLITIK KAUM SARUNGAN.

[1] *Ibid., 32.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul didalamnya yakni:

1. Hegemoni kiyai dalam karismatiknya terhadap para santri, terutama santri yang sudah lulus dari pondok pesantren.
2. Reaksi para santri terhadap kebijakan pemerintah daerah.
3. Respon para pemuda dalam mengkritik kebijakan pemerintah daerah.

Batasan masalah ditujukan agar masalah-masalah yang akan dibahas tidak melebar kemana-mana dan bisa tetap fokus. Masalah yang dikaji dalam penelitian dibatasi pada hal-hal berikut ini:

1. Hegemoni yang dilakukan dinasti politik oleh kaum sarungan terhadap para politik pemuda dalam persektif teori hegemoni menurut Antonio Gramci.
2. Program yang dilakukan para politik pemuda terhadap hegemoni dinasti politik kaum sarungan.
3. Respon politik pemuda terhadap hegemoni dinasti politik kaum sarungan.

C. Rumusan Masalah

2. Bagaimana teori hegemoni yang dilakukan dinasti politik kaum sarungan terhadap politik pemuda?
3. Bagaimana penerapan tori hegemoni terhadap hegemoni dinasti politik kaum sarungan?
4. Bagaiman respon politik pemuda terhadap hegemoni dinasti politik kaum sarungan?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui relevansi teori hegemoni, terhadap hegemoni dinasti politik kaum sarungan terhadap pemuda di Bangkalan?
2. Untuk mengetahui seberapa jauh penerapan teori hegemoni yang dilakukan dinasti politik kaum sarungan di Bangkalan ?
3. Untuk mengetahui respon politik pemuda terhadap hegemoni dinasti politik kaum .

E. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsi terhadap beberapa disiplin keilmuan dalam pemikiran islam sebagai sebuah karya ilmiah yang nantinya akan menjadi literatur bagi penelitian selanjutnya mengenai kajian yang memiliki fokus terhadap problematika sosial keagamaan dan kepemudaan.
2. Penelitian ini diharapkan bisa membuka kesadaran masyarakat terhadap persoalan yang timbul sebagai bias kekuasaan kiai, sehingga tidak terjadi pengkaburan antara esensi politik dan kultur keagamaan, yang nantinya masyarakat benar-benar mampu menjadi masayarakat yang cerdas dan dapat mengawal serta mengontrol kinerja pemerintah.
3. Penelitian ini diharapkan bisa dijadiakan acuan oleh sebagian pemuda untuk bergerak dalam politik kepemudaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka merupakan salah satu usaha untuk memperoleh data yang sudah ada, karena data merupakan satu hal yang terpenting dalam ilmu pengetahuan, yaitu untuk menyimpulkan fakta-fakta, meramalkan gejala-gejala baru, mengisi yang sudah ada atau sudah terjadi[1]. Sejauh pengetahuan dan pengamatan penulis, hingga saat ini belum ditemukan yang spesipik membahas Respon Politik Pemuda terhadap Hegemoni Dinasti Politik Kaum Santri, baik dalam bentuk buku, jurnal, maupun dalam bentuk karya ilmiah yang lainnya.

Namun untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap masalah di atas, penulis berusaha melakukan penelitian terhadap beberapa literature yang relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian ini. Ada beberapa karya tulis yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya yaitu buku yang berjudul "Menabur Kharisma, Menuai Kuasa karya Abdur Rozaki, dosen Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Buku yang sebetulnya merupakan untuk gelar magister sosiologi di UGM ini bercerita banyak tentang relasi kuasa antara Kyai dan Blater sebagai elemen masyarakat yang memiliki kekuatan sosial. Posisi Kyai dan Blater di tengah masyarakat Madura begitu terhormat dan *legitimate* (terlegitimasi). Oleh karena itu, keterlibatan mereka dalam proses-proses politik seperti pilkades sangat signifikan memengaruhi dinamika dalam setiap mementum pilkades. Pada penelitian tersebut Rozaki mengatakan bahwa masyarakat Madura

[1] Taufik Abdullah dan Rusli Karim, *Metode Penelitian Agama; Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1991), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belum sepenuhnya memiliki kesadaran politik secara komprehensif. Mereka tunduk dan patuh begitu saja terhadap perintah ke dua rezim kembar tersebut untuk memilih salah satu kandidat[1].

Persamaan penelitian yang dilakukan Rozaki dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama terdapat aktor yang ditokohkan di masyarakat yang turut bermain dalam proses pilkades atau pilkada. Perbedaannya adalah penelitian di atas mengkaji tentang pilkades, sedangkan peneliti sendiri mengkaji tentang pilkada.

Referensi lain yang penulis gunakan adalah jurnal berjudul "Melacak Peran Kyai-Santri Dalam Politik Kebangsaan di Indonesia" karya Fifi Nofiaturrahmah Dosen Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penelitian ini, Fifi lebih menitikberatkan pada gerakan politik para Kyai, di zaman revolus kemerdekaan dan zaman orde baru. Persamaannya dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama meneliti tentang peran kiyai dan para politik pemuda.

Kemudian penulis juga menggunakan jurnal dengan judul "Ketahanan Politik Wilayah Pondok Pesantren dalam Pemilihan Umum 2014" karya Bagus Anwar Hidayatulloh dari Fakultas Hukum Universitas Islam Darul Ulum (UNISDA) Lamongan tahun 2016. Penelitian ini menggambarkan mengenai proses transmutasi nilai-nilai dalam wilayah Republik Indonesia terutama dalam pemilu. Persamaan penulis dengan penelitian ini adalah sama-sama penelitian tentang pemilihan, namun perbedaanya adalah objek

[1] Abdur Rozaki, *Menabur Kharisma, Menuai Kuasa*, (Yogyakarta: Genta Press, 2004), 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dikaji bukan para pemuda yang ada di pondok pesantren melainkan para alumni pondok pesantren dengan para pemuda di luar pondok pesantren.

Selanjutnya peneliti juga menggunakan jurnal yang berjudul "(Perilaku Politik Elit & Hubungan Kyai - Santri) Dukungan Politik Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang Terhadap Pilgub Jatim 2013" karya Hendro Fadli Sari mahasiswa S1 Ilmu Politik, FISIP Universitas Airlangga. Persamaan penulis dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang perilaku dan peran kiyai dalam pemilihan umum. Perbedannya hanya terletak pada keluasan lokus yang diteliti. Kalau Hendro lokusnya provinsi sedangkan peneliti lokusnya hanya Kabupaten.

G. Kerangka Teoritis

Dalam melakukan pengamatan dan menganalisa masalah yang diangkat, diperlukan landasan sejumlah teori dari pakar Hubungan Internasional yang dianggap relevan dengan masalah yang diajukan oleh penulis.Kerangka acuan dibutuhkan dalam penulisan yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan penelitian, agar permasalahan dan topik yang dibahas tidak melenceng dari jalur pembahasan yang telah ditentukan.

Dalam terminologi politik penguasaan secara tak dasar lebih di kenal dengan istilah hegemoni, ketika kita berbicara bagaimana rasa takdzim seorang santri kepada sosok Kiai masih terlalu naïf jika diidentikan dengan istilah itu, tetapi penulis lebih memilih istilah hegemoni karena secara kontek

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sosial penguasaan tanpa sadar dari supra struktur kepada rakyat yang terjadi di Bangkalan lebih mendekati hegemoni.

Dalam hal ini seorang Kiai bisa dikatakan telah mengguanakan khairsmanya untuk menguasai tanpa sadar rakyat nya ketika dia menjabat sebagai pemangku kebijakan. Meski sebetulnya istilah hegemoni masih terlalu naïf jika di guanakan dalam pola komunikasi tersebut, tetapi ketiak merujuk kepada akar dan genealogi teori hegemoni menjadi lebih logis dan masuk akal.

Sebab, teori hegemoni merupakan sebuah teori politik paling penting abad XX. Teori ini dikemukakan oleh Antonio Gramci (1891-1937). Antonio Gramci dapat dipandang sebagai pemikir politik terpenting setelah Marx. Gagasanya yang cemerlang tentang hegemoni, yang banyak dipengeruhi oleh filsafat hukum Hegel, dianggap merupakan landasan paradigma alternatif terhadap teori Marxis tradisional mengenai paradigm *base-superstructure* (basis-suprastruktur). Teori-teorinya muncul sebagai kritik dan alternatif bagi pendekatan dan teori perubahan sosial sebelumnya yang didominasi oleh determinisme kelas dan ekonomi Marxisme tradisional.[1]

Teori hegemoni sebenarnya bukanlah hal yang baru bagi tradisi Marxis. Menurut Femia pengertian semacam itu sudah dikenal oleh orang Marxis lain sebelum Gramci, seperti; Karl Marx, Sigmund Freud, Sigmund Simmel. Yang membedakan teori hegemoni Gramci dengan penggunaan istilah serupa itu sebelumnya adalah; Pertama, ia menerapkan konsep itu

[1] Nezar Patria, *Antonio Gramsci Negara dan Hegemoni,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih luas bagi supremasi satu kelompok atau lebih atas lainnya dalam setiap hubungan sosial, sedangkan pemekaian iistilah itu sebelumnya hanya menunjuk pada relasi antara proletariat dan kelompok lainnya. Kedua, Gramci juga mengkarakterisasikan hegemoni dalam istilah "pengaruh kultural", tidak hanya "kepemimpinan politik dalam sebuah sistem aliansi" sebagaimana dipahami generasi Marxis terdahulu.[1]

Teori hegemoni dari Gramci yang sebenarnya merupakan hasil pemikiran Gramci ketika dipenjara yang akhirnya dibukukan dengan judul "Selection from The Prissons Notebook" yang banyak dijadikan acuan atau diperbandingkan khususnya dalam mengkritik pembangunan. Dalam perkembangan selanjutnya teori hegemoni ini dikritisi oleh kelompok yang dikenal dengan nama "New Gramcian". Teori hegemoni dibangun di atas preis pentingnya ide dan tidak mencukupinya kekuatan fisik belaka dalam kontrol sosial politik. Menurut Gramci, agar yang dikuasai mematuhi penguasa, yang dikuasai tidak hanya harus merasa mempunyai dan menginternalisasi nilai-nilai serta norma penguasa, lebih dari itu mereka juga harus memberi persetujuan atas subordinasi mereka. Inilah yang dimaksud Gramci dengan "hegemoni" atau menguasai dengan "kepemimpinan moral dan intelektual" secara konsensual.[2] Dalam kontek ini, Gramci secara berlawanan mendudukan hegemoni, sebagai satu bentuk supermasi satu kelompok atau beberapa kelompok atas yang lainnya, dengan bentuk

[1] *Ibid.,* 117.

[2] *Ibid.,* 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

supermasi lain yang ia namakan "dominasi" yaitu kekuasaan yang ditopang oleh kekuatan fisik.[1]

Melalui konsep hegemoni, Gramsci beragumentasi bahwa kekuasaan agar dapat abadi dan langgeng membutuhkan paling tidak dua perangkat kerja. *Pertama*, adalah perangkat kerja yang mampu melakukan tindak kekerasan yang bersifat memaksa atau dengan kata lain kekuasaan membutuhkan perangkat kerja yang bernuansa *law enforcemant*. Perangkat kerja yang pertama ini biasanya dilakukan oleh pranata Negara (state) melalui lembaga-lembaga seperti hukum, militer, polisi dan bahkan penjara.

Kedua, adalah perangkat kerja yang mampu membujuk masyarakat beserta pranata-pranata untuk taat pada mereka yang berkuasa melalui kehidupan beragama, pendidikan, kesenian dan bahkan juga keluarga. Perangkat karja ini biasanya dilakukan oleh pranata masyarakat sipil (*civil society*) melailui lembaga-lembaga masyarakat seperti LSM, organisasi sosial dan keagamaan, paguyuban-paguyuban dan kelompok-kelompok kepentingan (*interest groups*). Kedua level ini pada satu sisi berkaitan dengan fungsi hegemoni di mana kelompok dominan menangani keseluruhan masyarakat dan disisi lain berkaitan dengan dominasi langsung atau perintah yang dilaksanakan diseluruh negara dan pemerintahan yuridis.[2]

Antonio Gramsci (1891-1937) atau lebih dikenal Gramsci adalah seorang filsuf Italia, penulis, dan Marxis. Ia pernah menjadi Anggota pendiri

---

[1] Antonio Gramsci, *Catatan-catatan dari Penjara*,Terj. Teguh Wahyu Utomo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 289.

[2] *Ibid.*, 291.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan kemudian menjadi pemimpin Partai Komunis Italia, Gramsci sempat menjalani dipenjara pada masa berkuasanya rezim Fasis Benito Mussolini. Ia dianggap sebagai salah satu pemikir orisinal utama dalam tradisi pemikiran Marxis. Ia juga dikenal sebagai penemu konsep hegemoni budaya sebagai cara untuk menjaga keberlangsungan negara dalam sebuah masyarakat kapitalisme.

1. Konsep Hegemoni dan Negara

Konsep Gramsci tentang hegemoni adalah bahwa suatu kelas dan anggotanya menjalankan kekuasaan terhadap kelas-kelas di bawahnya dengan cara kekerasan dan persuasi. Hegemoni bukanlah hubungan dominasi dengan menggunakan kekuasaan, melainkan hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideoligis. Hegemoni adalah suatu organisasi konsensus. Dalam beberapa karyanya, *Prison Notebooks*, Gramsci menggunakan kata *direczione* (kepemimpinan, pengarahan) secara bergantian dengan *egemonia* (hegemoni) dan berlawanan dengan *dominazione* (dominasi).[1]

Hegemoni bagi Gramsci adalah kemampuan untuk mengakomodasikan semua kepentingan kelompok lain sehingga mau memberikan dukungan, serta berpartisipasi. Dengan jalan inilah sebenarnya kekuasaan dapat dicapai serta dapat dipertahankan. Hegemoni

[1] Roger Simon, *Gagasan-gagasan Politik Gramsc.* Terj. Kamdani dan Imam Baehaqi. (Yogyakarta: Insist, 1999), 19-20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak boleh didasarkan atas pengkooptasian aktivitas motorik ataupun intelektual kelompok lain.[1]

Bagi Gramsci, negara adalah batas tempat munculnya praktek-praktek kekerasan oleh aparatusnya (militer dan lainnya). Negara dalam hal ini dimaknai sebagai pelayanan sipil yang menyangkut kesejahteraan rakyat dan penyedia pendidikan bagi masyarakatnya.

2. Ideologi dan Intelektual Organik

Gramsci beranggapan bahwa ideology harus menjadi sebuah kesadaran kolektif, serta ideology yang baik adalah ketika mempu mengakomodasikan kepentingan kelompok-kelompok lain, serta bisa untuk menarik kelompok lain ke dalam kelompok kita. Gramsci melihat bahwa ideology itu sifatnya arbriter (berubah-ubah) sesuai dengan perkembangan pemikiran. Secara tidak langsung, disadari atau tidak bahwa Gramsci telah menjebakkan dirinya terhadap bias dari kepentingan kelompok intelektual (organik).

Dari kelompok intelektual inilah, progresifitas akan tumbuh dengan sangat cepat, mengingat mereka memiliki kemampuan untuk mengorganisir massa. Maka bisa juga dikatakan bahwa konsepsi ideology yang dilihat dari bagaimana konsepsi ideology arbriter ini adalah dari sudut pandang paradigma sistem. Maka kita juga akan menemukan seperti

[1] Abd. Malik Haraman, dkk, *Pemikiran-pemikiran Revolusioner. (*Yogyakarta: Averroes, 2001), 61-62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dikatakan oleh Habermas sebagai solidaritas budaya dan komunitas masyarakat itu terbentuk.[1]

Jelas terlihat bias kepentingan (kekuasaan) dalam konsepsi ideology tersebut, bagi Gramsci tujuan partai atau kelompok sosialis adalah terbentuknya masyarakat sosialis itu sendiri. Dengan konspesi ideology ini tentu (partai, kelompok) sosialis harus menjadikan dirinya inclusive serta mampu melakukan perubahan-perubahan secara kontinyu.

Bagi Gramsci, kaum intelektual terdiri dari dua wilayah, yakni teori (intelektual tradisional) dan menghubungkannya dengan realitas sosial (intelektual organic). Intelektual organic dengan demikian adalah intelektual yang dengan sadar dan mampu menghubungkan teori dan realitas sosial yang ada, dan ia bergabung dengan kelompok-kelompok revolusioner untuk men-support dan meng-counter hegemoni pada sebuah transformasi yang direncanakan.[2]

3. Civil Society dan Masyarakat Politik

Masyarakat sipil menurut Gramsci adalah masyarakat yang memiliki privasi, otonom serta terlepas dari proses produksi, yaitu semua organisasi yang membentuk masyarakat sipil dalam sebuah jaringan kerja dari praktek-praktek dan hubungan sosial yang kompleks, termasuk buruh dan pemodal. Dalam masyarakat sipil semua kepentingan dari semua kelompok muncul.[3]

---

[1] *Ibid.,* 70.

[2] *Ibid.,* 92.

[3] *Ibid.,* 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Harus dibedakan antara masyarakat sipil dengan aparat pembentuk negara karena mereka mempunyai monopoli dan bersifat koersif yang disebut masyarakat politik. Masyarakat sipil dalam komunitasnya, terjadi proses hegemoni antar kelompok didalamnya karena terdapat kompleksitas hubungan sosial. Sementara disisi lain, masyarakat sipil juga harus mengatasi hegemoni yang dilakukan oleh masyarakat politik. Masyarakat politik oleh Gramsci bukan dalam pengertian negara, koersif dan aparat negara. Penjelasan Gramsci adalah bahwa relasi kedua antara kedua kelompok tersebut berhubungan secara signifikan, bahwa masyarakat politik melakukan penindasan melalui tindakan koersifnya sebagai sarana hegemoni.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan tersebut diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, uraian, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, dan atau organisasi para pemuda di Bangkalan dalam suatu konteks Pemilu yang akan dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi didapat setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian. Berdasarkan analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum yang sifatnya abstrak tentang kenyataan-kenyataan[1].

Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memahami suatu fenomena atau gejala sosial dengan lebih benar dan lebih obyektif, dengan cara mendapatkan gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji. Penelitian kualitatif tidak untuk mencari hubungan atau pengaruh antar variabel-variabel, tetapi untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang suatu fenomena, sehingga akan dapat diperoleh teori[2].

1. Jenis Penelitian

Jenis pendekatan kualitatif yang digunankan adalah pendekatan etnografi. Etnografi digunakan untuk meneliti kelompok atau komunitas relasi-interaksi manusia atau masyarakat berkaitan dengan perkembangan sosial dan budaya tertentu yang didasarkan atas kajian-kajian dalam teori yang dianut dan dipakai.

Metode penelitian etnografi dianggap mampu menggali informasi secara mendalam dengan sumber-sumber yang luas. Dengan teknik *observatory participant*, etnografi menjadi sebuah metode penelitian

---

[1] Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 2.

[2] Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 1999), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang unik karena mengharuskan partisipasi peneliti secara langsung dalam sebuah masyarakat atau komunitas sosial tertentu.[1].

2. Data yang Dikumpulkan

Data dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif, yakni data yang berbentuk kata, kalimat, bagan, gambar dan foto, bukan berupa angka-angka.[2] Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode dokumentasi, yaitu mengambil dari bahan-bahan tertulis baik sumber primer maupun sekunder.

Penelitian ini pada dasarnya terfokus kepada sumber pokok yaitu pemikiran Antonio Gramsci, akan tetapi peneliti juga memasukkan pendapat pemikir lainnya yang relevan dengan teori hegemoni yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini, guna mendapat gambaran yang utuh, yang kemudian dideskripsikan dan dianalisis sehingga dapat memudahkan dalam menjawab persoalan yang telah dirumuskan dalam pokok masalah.

Setelah semua aktivitas di atas terlaksana, dengan terkumpulnya data-data yang dibutuhkan, barulah dilakukan pengkajian secara mendalam melalui pengamatan dan kegiatan analisis dari berbagai sisi, seperti menelaah makna-makna yang dilakukan kaum sarungan dalam konteks penghormatan, atau lebih diarahkan kepada sepak terjangnya

---

[1] *Ibid*., 54.

[2] Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi Mixed Methods*, (Bandung:Alfabeta, 2011), 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam kancah perpolitikan yang membuat para pemuda di Bangkalan merespon dengan massif (intelektual organik) ataupun pasif (masyarakat civil) sehingga penelitian tersebut bisa sampai pada tujuan yang dimaksud

3. Sumber Data

a. Sumber Primer

Diperoleh melalui observasi atau pengamatan pada obyek penelitian serta wawancara secara langsung atau tanya jawab pada informan, karena informan adalah orang-orang yang benar-benar mengetahui dan memahami kondisi yang ada pada subyek penelitian. Dalam menentukan data dan informasi apa saja yang dibutuhkan dalam penulisan, penulis mengacu pada poin-poin tujuan penulisan[1].

b. Sumber Sekunder

Diperoleh melalui pengumpulan buku-buku studi kepustakaan, dokumen instansi serta mempelajari melalui internet. Kemudian penulis kumpulkan sebagai bahan tambahan dalam penelitian.

4. Tehnik Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode ini dapat dilakukan secara langsung dalam menjajaki dan mengenal obyek penelitian terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan:

1) *Place* yaitu tempat yang diobservasi di daerah Bangkalan Madura.

[1] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D,* (Bandung: Alfabeta, 2012), 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Actor* yaitu orang-orang yang dijadikan informan.

3) *Activity* yaitu seperangkat kegiatan yang dilakukan oleh actor dalam rangka mewujudkan tujuan yang ingin dicapai.

Dalam penelitian ini observasi dilakukan peneliti bertujuan untuk menjawab hipotesa tesis ini .

b. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan wawancara dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam hal ini wawancara dilakukan untuk menguji kebenaran atas hepotesa.

c. Dokumentasi

Yaitu proses melihat kembali data-data dari dokumentasi berupa segala macam bentuk informasi yang berhubungan dengan penelitian yang dimaksud dalam bentuk tertulis atau rekaman suara

5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan suatu proses untuk memperoleh data ringkasan berdasarkan kelompok data mentah. Data mentah yang telah dikumpulkan oleh peneliti tidak akan ada gunanya bila tak diolah. Pengolahan data juga merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan pengolahan data, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Langkah-langkah pengolahan data:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Penyusunan data

Data yang sudah ada perlu dikumpulkan semua agar mudah untuk mengecek apakah semua data yang dibutuhkan sudah terekap semua. Langkah ini di dilakukan agar peneliti bisa menyususn secara sistematis dan sesuai fokus yang disajikan.

b. Klasifikasi data

Klasifikasi data merupakan usaha menggolongkan, mengelompokkan, dan memilah data untuk mempermudah dalam pengumpulan data.

c. Pengolahan data

Pengolahan data dilakukan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Agar peneliti bisa tahu apakah hipotesis yang akan diuji itu berkaitan dan berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan.

d. Interpretasi hasil pengolahan data

Tahap ini dilakukan setelah peneliti menyelesaikan analisis data yang penulis kumpulkan. Kemudian langkah selanjutnya penulis menginterpretasikan hasil analisis dan menarik suatu kesimpulan yang berisikan intisari dari seluruh rangkaian kegiatan penelitian dan membuat rekomendasinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data berkaitan dengan bagaimana peneliti akan menerapkan prosedur penyelesaian masalah untuk menjawab perumusan masalah penelitian.

a. Deskriptif Analisis

Dalam penelitian ini metode pengolahan data yang dipakai adalah deskriptif analisis, yakni suatu analisa yang berangkat dari mendeskripsikan respon dari para pemuda terhadap hegemoni kaum sarungan dengan menggunakan teorinya Antonio Gramsci yang kemudian diselami, diinterpretasi dan mencari relevansinya serta memberi kesimpulan.

Respon pemuda dan hegemoni dinasti yang dijadikan obyek meteril dalam penelitian ini kemudian akan dianalisis dengan menggunakan metode analisa data deskriptif-analisis. Metode deskriptif digunakan dalam rangka untuk memberikan gambaran yang ada, serta memberika interpretasi terhadap objek penelitian ini.[1] Sedangkan metode analisis digunakan untuk melakukan pemeriksaan (analisis) secara konsepsional atas makna yang termuat dalam pelbagai istilah yang digunakan dan pelbagai pernyataan yang dibuat dalam penelitian ini

b. Pola Pikir Deduktif

[1] Anton Baker dan Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Metode berpikir deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus. Dalam hal ini penulis menganalis masalah dalam tesis ini dengan melihat respon para pemuda dengan secara global dan ditarik pada berbagai tindakan hegemoni oleh para kaum sarungan.

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan kita lebih sistematis dan memudahkan pemahaman terhadap kajian ini, serta memperoleh gambaran yang terarah dan konferehensif, maka pembahasan dalam penelitian ini akan disusun sebagai berikut:

Bab pertama, Pendahuluan, menguraikan argumentasi terhadap pentingnya kajian yang dilakukan. Bagian ini mencakup latar belakang masalah, mengapa penulis mengangkat tema ini, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan tinjauan pustaka, metode, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua mendeskripsikan serta menguraikan secara umum tentang Program Politik Pemuda dan pelaksanaannya.

Selanjutnya untuk pembahasan mengenai hegemoni politik kaum sarungan yang berada di Bangkalan akan dibicarakan dalam bab tiga.

Sementara itu, untuk pembahasan pokok dari penelitian ini berada pada bab yang ke empat yang merupakan hasil dari penelitian ini yaitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

respon balik para pemuda terhadap hegemoni kaum sarungan beserta dakmpaknya.

Sedangkan pada bagian terakhir (bab kelima) penyajian ini diakhiri dengan penutup yang berisi simpulan dari semua uraian bab-bab sebelumnya dan jawaban dari rumusan masalah dari penelitian ini serta saran bagi penelitan selanjutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PROGRAM POLITIK PEMUDA DI BANGKALAN

A. Sekilas tentang Pemuda

Peran pemuda sangat dibutuhkan dalam pembangunan. Seorang pemuda dituntut dapat mengubah keadaan kearah yang lebih baik bukannya memperburuk keadaan atau merusak tatanan yang telah ada. Calon-calon pemimpin yang akan datang, tokoh masyarakat atau bahkan menjadi panutan untuk orang lain.[1]

Seorang pemuda harus bisa beradaptasi dan bergaul dengan lingkungan disekitarnya. Maksudnya agar tumbuh sikap rasa peduli dan rasa kebersamaan di dalam dirinya. Lihatlah di zaman sekarang teknologi yang berkembang telah disalahgunakan seolah-olah globalisasi telah memberi efek buruk pada generasi muda. Individualisme itulah yang terjadi pada pemuda zaman sekarang, sikap peduli pada lingkungan sekitar menurun drastis.[2] Contoh umum jika ada kerja bakti di lingkungan sekitar banyak pemuda yang bermalas-malasan untuk ikut serta dalam kegiatan ini, lebih memilih bermain di rumah atau memainkan android, iphone atau media sosial.

Dalam kehidupannya seorang pemuda dituntut dapat bersosialisasi dengan masyarakat lainnya. Proses sosialisasi pemuda didefinisikan proses yang membantu individu melalui belajar dan penyesuaian diri. Proses

[1] Anderson Ben, *Revolusi Pemuda*, (Jakarta : PT.Grapindo, 2003), 43.
[2] Amitai Etzioni, *Organisasi-Organisasi Modern*, (Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008), 46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sosialisasi sebenarnya berawal dari dalam keluarga. Melaui proses sosialisasi, individu (pemuda) akan terwarna cara berpikir dan kebiasaan-kebiasaan hidupnya dengan proses sosialisasi, individu menjadi tahu bagaimana ia bisa bertingkah laku ditengah-tengah masyarakat dan lingkungan budayanya. Sesuai dengan pepatah lama semakin banyak dilihat semakin banyak dirasa. Jadi pengalaman adalah hal yang dibutuhkan seorang pemuda bisa bertindak dan mengasah pola pikirnya untuk perubahan yang akan datang.[3]

Pengalaman adalah hal yang sangat penting dalam menunjang kemajuan pola pikir seorang pemuda. Pemuda dituntut kreatif, inovatif dan korporatif (kerjasama "dalam hal baik"). Semakin banyak ia bergaul dengan orang lain maka semakin banyak pengalaman yang ia peroleh. Ia dikenal banyak orang dan mendapat banyak sekali akses dari orang disekitarnya ditambah dengan etika dan kepribadiannya yang baik, siapapun pasti menyukai sosok pemuda seperti ini. Kemudian kita bandingkan dengan pemuda yang bersifat individualisme, kikuk ditengah masyarakat, kaku dan tidak mampu mengaplikasikan manfaat dirinya akan terbuang di tengah kehidupan.

Kondisi yang masih labil membuat pemuda sering hanyut dengan berbagai pergaulan, untuk itu berhati-hatilah memilih teman bergaul. Diperlukan pertahanan yang kuat agar tidak terjerumus ke dalam kegelapan akibat pergaulan bebas yang sangat membahayakan generasi muda. Banyak contoh-contoh menunjukkan pemuda atau generasi zaman sekarang rusak,

[3] Kamsil, *Aku Pemuda Indonesia, Pendidikan Politik Generasi Pemuda* (Jakarta : Balai Pustaka, 2001), 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mulai dari video porno SMA, sex bebas SMP. Kalau sudah seperti itu, akan jadi apa generasi para pemuda. Bukannya memperbaiki kondisi bangsa sekarang malah menambah beban yang ada.

Kilas balik sejarah bangsa kita Indonesia, bukan fisik atau senjata yang menjadi tonggak awal kita merdeka tapi karena adanya inisiatif atau kesadaran para pemuda zaman pejuang waktu saat kita merdeka. Adanya sikap revolusioner dan motivasi diri maka pemuda saat itu bisa membawa negara kita mencapai kemerdeekaan. Berdirinya Bung Tomo telah menumbuhkan rasa kesatuan dan persatuan rakyat Indonesia. Ini artinya bahwa pemuda mampu menggapai apapun dan mampu membuat sebuat perubahan yang luar biasa. Bung Tomo adalah organisasi perkumpulan pemuda yang pertama, lalu semangatnya telah memotivasi pemuda-pemuda lainnya sehingga terbentuklah organisasi pemuda-pemuda yang lain seperti Jong Java, Jong Sumatera, maupun jong-jong lainnya.[4]

Dalam sejarah pidatonya, Soekarno pernah mengobarkan semangat juang pemuda. Apa kata Soekarno "Beri aku sepuluh pemuda, maka akan kugoncangkan dunia". Begitu besar peranan pemuda di mata Soekarno, jika ada Sembilan pemuda lagi maka Indonesia menjad negara Super Power.[5]

Pemuda adalah sesuatu yang luar biasa, seperti yang telah dibicarakan sebelumnya walaupun emosi yang sangat labil tapi pemuda memiliki kelebihan-kelebihan yang menonjol, yaitu mau menghadapi perubahan baik berupa perubahan sosial maupun kultural dengan menjadi

[4] *Ibid*, 58.
[5] Anderson Ben, *Revolusi Pemuda*, (Jakarta : PT.Grapindo, 2003), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelopor perubahan itu sendiri. Tetapi sering kali informasi yang diterima tidak melalui seleksi yang ketat sehingga seorang pemuda mudah terbawa arus dan pengaruh media massa yang ada.

Kesimpulannya adalah bahwa seorang pemuda harus memiliki jiwa dan sikap mental yang bisa membawa ia menciptakan sebuah iklim perubahan kearah yang lebih baik dan memiliki kemampuan sosialisasi ditengah kehidupan masyarakat agar ia mampu memecahkan sebuah polemik dan mampu beradaptasi dengan kehidupan sosialnya.

Secara sosiologis peran ulama di tengah-tengah masyarakat khususnya pada komunitas santri, menjadi posisi yang sangat diistimewakan. Mereka dihormati dan nasehat-nasehatnya dipatuhi. Status ekonomi sosial mereka beragam, meski pada umumnya berasal dari kelompok bangsawan kaya yang memiliki hamparan tanah yang luas. Akumulasi dari status sosial ditopang kekayaan dan ilmu pengetahuan agama yang luas menjadikan ulama sebagai pemimpin kharismatik yang disegani. Kekuatan lain yang melekat pada figur ulama terletak pada kehalusan dan kemampuan menafsirkan paham yang dianut, yang kemudian membuat mereka benar-benar sanggup melakukan peran yang oleh Geertz disebut sebagai *culture broker*,[6] yaitu menjembatani transformasi nilai-nilai kultural yang berkembang di masyarakat. Dari kelebihan ulama semacam itulah yang membuat mereka terlibat dalam kepemimpinan masyarakat dan terjun dalam dunia politik.

[6] Nurul Azizah, *Artikulasi Politik Santri: dari Kiai menjadi Bupati*, (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2013), 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peran pemuda di Bangkalan sangat begitu dinanti dan diharapkan dalam memutus pola dan tradisi ketakdizan yang berlebihan kepada seorang kiai yang duduk di tampuk kekuasaan dalam artian pemangku kebijakan, karena satu dan beberapa hal tingkat amino pemuda untuk bicara lantang pada pemerintah menjadi terkooprasi oleh pola komunikasi dan budaya yang sudah mengakar. Dalam hal ini budaya yang dimaksud adalah budaya memisahkan mana posisi seorang kiai yang sedang menjadi politisi dan mana kiai yang sedang duduk sebagai pemangku kebijakan.

Pemuda diidentikkan dengan kaum muda yang merupakan generasi bangsa, yang akan menentukan perubahan-perubahan di masa yang akan datang. Sebagai seorang mahasiswa/mahasiswi kita adalah pemuda yang memiliki intelektual yang dapat berpikir demi perubahan dan kemajuan negara ini. Telah kita ketahui bahwa pemuda atau generasi muda merupakan konsep-konsep yang selalu dikaitkan dengan masalah nilai. Hal ini merupakan pengertian idiologis dan kultural daripada pengertian ini. Di dalam masyarakat pemuda merupakan satu identitas yang potensial sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan bangsanya karena pemuda sebagai harapan bangsa dapat diartikan bahwa siapa yang menguasai pemuda akan menguasai masa depan.[7]

Menilik dari sisi usia maka pemuda merupakan masa perkembangan secara biologis dan psikologis. Oleh karenanya pemuda selalu memiliki aspirasi yang berbeda dengan aspirasi masyarakat secara umum.

[7] *Ibid*, 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam makna yang positif aspirasi yang berbeda ini disebut dengan pembaharuan.[8]

Dalam kosakata bahasa Indonesia, pemuda juga dikenal dengan sebutan generasi muda dan kaum muda. Seringkali terminologi pemuda, generasi muda atau kaum muda memiliki definisi beragam. Definisi tentang pemuda diatas lebih pada definisi teknis berdasarkan kategori usia, sedangkan definisi lainnya lebih fleksibel dimana pemuda/generasi muda/kaum muda adalah mereka yang memiliki semangat pembaharu dan progresif. [9]

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemuda adalah sebuah kehidupan yang berdiri direntang masa kanak-kanak dan masa dewasa. Dimasa inilah seorang pemuda bersifat labil, kontrol emosi dan kestabilan pendirian masih bisa dipengaruhi oleh pihak luar. Seorang pemuda mempunyai ciri khas yang menggambarkan seperti apa ia terlihat yang menunjukkan kepribadiannya.

B. Program Politik Pemuda

1. Advokasi

Pemerintah dengan model dinasti politik yang terjadi di alam demokrasi memang tidak terlepas dan bersumber dari keterpilihan masing-masing individu dalam setiap pemilihan, baik pileg, pilbup, pilgub, maupun pilpres. Pendeknya dinasti politik adalah hak, dan demokrasi membuka ruang sebebas-bebasnya kepada rakyat, kepada siapapun, untuk

[8] Kemenpora (2009), *Rencana Aksi Nasional Kepemudaan*. Jakarta : Kemenpora
[9] Dewanata, P., & Syaifullah, C. (2008). *Rekonstruksi Pemuda*. Jakarta : Kemenpora

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memilih atau tidak memilih, untuk mencalonkan atau tidak mencalonkan, sesuai preferensi masing-masing. Hanya saja, reformasi yang baru berlangsung, tidak secepat kilat memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, sehingga mobilisasi massa lebih menonjol ketimbang partisipasi murni. Praktik patronase politik menjadi wacana subtantif dalam mobilisasi tersebut.[10]

Sebagai contoh adalah Bupati Indramayu Anna Sophanah meneruskan jabatan dari suaminya, Irianto MS Syafiuddin. Demikian pula dengan Bupati Kendal Widya Kandi Susanti, Bupati Bantul Sri Suryawidati, Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari, dan Bupati Kediri Haryanti Sutrisno, yang melanjutkan posisi suami masing-masing. Adapun Mohammad Makmun Ibnu Fuad menggantikan ayahnya, Fuad Amin, sebagai Bupati Bangkalan.

Pola lainnya adalah maju dalam pilkada dengan posisi berbeda sehingga dinasti politik bisa terbangun lebih besar. Contohnya, Gubernur Lampung Sjachroedin ZP, sedangkan anaknya menjadi Bupati Lampung Selatan Rycko Menoza. Gubernur Sulut Sinyo Harry Sarundajang dan anaknya, Ivan SJ Sarundajang, Wakil Bupati Minahasa. Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, dan adiknya, Ichsan Yasin Limpo, Bupati Gowa.

"Kementerian Dalam Negeri sebenarnya sudah mensinyalir kekerabatan dalam jabatan kepala/wakil kepala daerah sejak lama. Sedikitnya ada 57 kepala/wakil kepala daerah yang berhubungan keluarga.

---

[10] Zada Khamami, *Dinamika Ideologi dan Politik Kenegaraan Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: Grapindo, 2010), 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena itu, kami mengusulkan pembatasan kerabat yang mencalonkan diri dalam pilkada. Bahkan, kalau DPR mau, pengaturan bisa dikembangkan untuk lebih dari satu posisi," tutur Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, di Jakarta, Jumat (18/10/2013).

Namun, sampai saat ini, DPR belum menyetujui usulan pemerintah. Justru DPR memilih ada pengetatan syarat kompetensi, rekam jejak, dan integritas alih-alih membatasi kerabat yang mencalonkan diri dalam pilkada.

Menurut Gamawan, UUD 1945 tidak melarang kerabat untuk mencalonkan diri dalam pilkada atau pemilu sebab setiap orang memiliki hak sama untuk memilih dan dipilih. Namun, disebutkan pula, pembatasan untuk menjamin hak dan kebebasan orang lain berdasarkan keadilan dan norma-norma lain seperti tercantum dalam Pasal 28 J (2).

Masyarakat dan pemerintah pusat menyadari potensi buruk dari dominasi keluarga di sebuah daerah. Karena itu, perubahan terhadap UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah akan mengatur larangan keluarga kepala daerah petahana mencalonkan diri dalam pilkada setelah masa jabatan kepala daerah habis. Namun, rencana aturan itu masih terbatas di satu daerah. Memang belum menjangkau jika sebuah dinasti politik di daerah membagi anggota keluarganya untuk menguasai jabatan publik yang tersedia.

Masyarakat di Bangkalan juga menyadari hal tersebut oleh karena itu para kelompok revosioner atau intelektual organik (meminjam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsepnya Gramsci) melakukan beberapa kegiatan melalui ORMAS, LSM, paguyuban dan lembaga-lembaga sejenis lainnya yang tujuannya untuk mengawasi dan melindungi kepentingan warga Bangkalan dalam kaitannnya dengan kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah yang ada di Bangkalan.

Kegiatan yang dilakukan oleh kaum intelektual organik d Bangkalan antara lain membuka posko pengaduan masyarakat, mengadakan aksi atau yang lebih dikenal dengan istilah demo di depan kantor-kantor Dinas. Salah satu sosok intelektual organik yang terkenal adalah Mathur Khusairi (tergolong pegiat anti korupsi) yang kerap mengungkap berbagai kasus korupsi di Bangkalan hingga ke KPK.

Semua itu merupakan bentuk advokasi yang dilakukan oleh para kaum intelektual organik dalam upaya untuk mengubah kebijakan, posisi atau program dari berbagai institusi maupun lembaga di tingkat lokal.

1. **Edukasi politik**

Esensi demokratisasi sebenarnya adalah untuk membebaskan masyarakat dari belenggu otoritarian, sebuah transformasi nilai dari masyarakat tertutup kepada masyarakat yang lebih terbuka, sehingga masyarakat mendapatkan hak politiknya secara proporsional, terbentuknya *civil society* yang mapan, dan adanya *check and balance* yang kontruktif. Tetapi di tengah proses pendemokratisasian tersebut, nyatanya demokratisasi juga telah ditunggangi oleh para *free rider* yang kurang lebih memanfaatka momen untuk adu kuasa baru. Setelah bertahun-tahun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibungkam hak politiknya oleh rezim otoriter, hasrat untuk menjadi raja kecil di daerah mewabahi segenap elemen masyarakat di spektrum lokal. Bagitupun dengan demokratisasi di Indoesia, yang tak luput dari keberadaan para pembajak demokrasi tersebut. Saat demokratisasi berlangsug, banyak di antara mereka, khususnya para pemain politik lokal yang juga memanfaatkan momen reformasi sebagai wadah arena persaingan untuk berkuasa. Mereka umumnya para elit lokal yang dulu saat zaman orba adalah para penyokong, maupun kalangan yang beroposisi terhadap soeharto.[11]

Terungkapnya praktik dugaan suap Bupati Klaten, Jawa Tengah Sri Hartini atas pengaturan pengisian jabatan di lingkungan Pemkab Klaten menambah deretan dinasti politik kepala daerah bermasalah. Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menilai, dinasti politik akan menjadi kultur baru yang sulit dihilangkan dalam Pilkada Serentak 2017.

Maraknya kasus korupsi menunjukkan praktik dinasti politik minim manfaat. Kendati sudah banyak yang ditangkap tangan KPK, potensi budaya dinasti politik dalam pilkada tetap terpelihara. Itu lantaran kebutuhan ekonomi menggaungi mereka sehingga terdorong memperkaya diri sendiri ataupun untuk kepentingan anggaran daerah.

"Belum ada upaya yang kuat untuk ingatkan politik dinasti ini berbahaya. Apalagi ada putusan MK yang memperbolehkan dinasti politik

[11] *Ibid.*, 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam pelaksanaan pilkada. Karena itu, tantangan pilkada makin berat," katanya dalam diskusi di Jakarta, Selasa (3/1).

Dalam perhelatan pilkada mendatang, pemerintah melalui Bawaslu harus turun tangan mengawasi praktik-praktik kotor ini. Setidaknya pemerintah dapat menutup celah terjadinya dinasti politik. Peneliti Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Indonesia (PSIK) Arif Susanto menyatakan, ikatan primordial dalam politik identitas menjadi suatu yang penting.

> "Sebab seringkali pemilih dalam hal ini masyarakat menjadi terpolarisasi secara otomatis untuk memilih orang yang direkomendasikan oleh kepala daerah sebelumnya. Jadi jangan lagi gunakan ikatan primordial untuk kuatkan polarisasi masyarakat," ujar Arif.

Di sisi lain, perlu meminimalisasi praktik dinasti politik yang berpotensi korupsi dengan bermain pada hukum nonformal seperti norma masyarakat. Menurut Arif, perlu ada pemberian pemahaman untuk mengubah perilaku si pemilih agar tidak memilih calon kepala daerah yang merupakan rekanan atau saudara dari kepala daerah sebelumnya.

Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang sependapat. Menurut dia, kualitas calon kepala daerah di 2017 belum ada jaminan yang lebih baik. Penangkapan para pejabat Tanah Air, kata Salang, menunjukkan bukti nyata, mental korupsi masih melekat pada mereka. "Ini artinya mental korupsi sangat dalam, lantaran menjadi praktik sehari-hari. Langkah awal, parpol harus lakukan penjaringan calon yang diusung," kata Salang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketua YLBHI Julius Ibrani berpandangan lain. Menurut dia, munculnya praktik korupsi bukan akibat dari kultur yang berkembang. Itu dilandasi minimnya edukasi politik yang tidak ditanam sejak dini. Salah satu poin penting mengurangi dinasti politik yang berbuah korupsi yakni dengan menumbuhkembangkan edukasi politik.

> "Pemerintah juga perlu melakukan pengawasan dalam pidana pemilu dan follow up the money sehingga bisa mengkaji aliran dana yang diperoleh berasal dari mana," ujar Julius.

Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengakui, dinasti politik kerap menimbulkan risiko korupsi yang lebih tinggi. Sebab banyak celah yang bisa dimainkan seperti pengisian jabatan, rekomendasi kewenangan, dan perizinan. "Ke depan perlu ada perbaikan sistem yang bisa meminimalisasi terjadinya dinasti politik seperti penilaian kinerja aparatur sipil negara berdasarkan prestasi kerja," kata Febri.

Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 7 UU No. 8/2015 huruf r mengenai larangan calon kepala daerah yang masih memiliki hubungan keluarga dengan petahana, Rabu 8 Juli lalu. Menurut MK, pasal tersebut merupakan aturan yang diskriminatif karena membatasi hak berpolitik karena hubungan kekerabatan dengan petahana.

Politik dinasti, khususnya pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dianggap telah mencederai semangat demokrasi dan menghambat kompetisi untuk merebut tampuk kekuasaan di daerah. Namun, para pendukung pengadopsian pasal tersebut kedalam UU tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemilihan Kepala Daerah tampaknya luput memperhatikan sebab-sebab menjamurnya praktek politik dinasti di Indonesia.

Berbagai kritik yang diajukan terlalu menekankan pada dampak buruk politik dinasti. Implikasinya, mereka berpikir bahwa memutus mata rantai dinasti politik harus melalui undang-undang yang membatasi hak dasar politik untuk mencalonkan diri dalam pemilu. Selain mencederai prinsip kesetaraan hak politik warga negara, disain institusional seperti ini juga mengabaikan faktor-faktor struktural penyebab munculnya dinasti politik.

Di Bangkalan sendiri ada beberapa LSM yang turut memberikan edukasi politik agar masyarakat sadar akan pentingnya pengetahuan tentang perpolitikan yang terjadi di daerahnya. Salah satunya adalah CIDE yang pada tahun 2009 bekerja sama dengan USAID untuk memberikan pendidikan bagi para pemilih (vooters education) pada kelompok-kelompok marginal, perempuan, dan grup pengajian yang ada di kampung dan juga melakukan penguatan komunitas dalam melakukan upaya pendampingan terhadap kepala desa. Ada nuga MCW (Madura Corrupton Watch) bentuk evolusi dari BCW (Bangkalan Corrupton Watch) yang merupakan gabungan dari beberapa LSM wilayah Madura lainnya yang tergabung menjadi satu dan bernaung di satu nama, yag fokus di permasalahan pemberantasan korupsi. Gerakan civil society lainnya yang ada di Bangkalan adalah Formula (Forum Pemuda Bangkalan) sebagai wadah dan forum bagi para pemuda Bangkalan untuk menuangka ide dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gagasan kreatifya terhadap pembangunan di Bangkalan. Kegiatan edukasi politik lainnya dari para aktivis dan LSM adalah seperti mengadakan Sekolah Anggaran yang berisi tentang sosialisasi APBD.[12]

A. Pelaksanaan Program Politik Pemuda

Upaya LSM dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah, adalah dengan cara berdialog. Selain itu, mereka juga memberikan data tentang isu yang sedang dibahas. Memang tak semua LSM begitu masif dalam berkomunikasi dengan dinas, namun dari beberapa LSM di Bangkalan yang cukup sering berkomunikasi dengan pihak pemerintah, diantaranya adalah LSM CIDE dan LSM MCW.

Jika ada suatu masalah dan itu sifatnya urgen, maka mereka akan segera mendesak pihak pemerintah untuk mengambil keputusan. Cara yang mereka lakukan adalah dengan memasifkan intensitas pertemuan dengan dinas. Namun jika masalah yang diahadapi tidak terlalu mendesak mereka melakukan pertemuan dengan dinas hanya intensitas yang sewajarnya saja.

Menurut Philip J. Eldrige yang disadur ulang oleh Fakih Mansour sebuah LSM memiliki tiga peran pokok: memberdayakan masyarakat dalam bentuk organisasinya sendiri sesuai dengan kebutuhanya, mewujudkan nilai-nilai dan pendekatan partisipatoris dalam pengembangan masyarakat. Kemudian peran ketiga adalah menjadi wakil masyarakat dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingannya (advokasi).

[12] Data diolah hasil wawancara dengan Nur Hakim, S. Pd. I., M. Ag.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika merujuk dari apa yang dikemukakan oleh Philip, dapat dilihat pola gerak dari beberapa LSM di Bangkalan. LSM di Bangkalan tidak semua bergerak dalam ranah pengawasan dan advokasi terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat. Dari beberapa LSM yang massif berinteraksi dengan pemerintah, diantaranya adalah LSM MCW yang menjalankan peran advokasi dan pengawasan terhadap masyarakat. Sedangkan LSM CIDE menjalankan peran pemberdayaan masyrakat. Peran advokasi dan pengawasan yang dilakukan oleh MCW, adalah dengan memantau setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan akan langsung bergerak jika ternyata kebijakan tersebut tidak berpihak kepada masyarakat. Sedangkan peran pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh CIDE adalah dengan mengadakan pelatihan sekolah anggaran yang bekerjasama dengan Forum Indonesia untuk Transpransi Anggaran (FITRA) Tuban, dan membangun fasilitas dan infrastruktur pendidikan, pelatihan kewirausahaan dan membangun pusat belajar masyarakat.[13]

[13] Data diolah hasil wawancara dengan Nur Hakim, S. Pd. I., M. Ag.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

HEGEMONI POLITIK KAUM SARUNGAN DI BANGKALAN

A. Pemerintahan

Kekuasaan yang dipegang oleh mantan bupati Bangkalan, Fuad Amin, selama dua periode berturut-turut amat begitu besar dan tak terbendung. Apalagi karir politiknya tidak hanya berhenti sebagai bupati saja, melainkan terus berlanjut hingga sukses menjabat sebagai ketua dewan DPRD Bangkalan dari fraksi partai Gerindra. Maka tak aneh jika kemudian masyarakat Bangkalan menjuluki Fuad Amin dengan gelar kanjeng. Gelar ini secara tidak langsung menyiratkan bahwa Fuad Amin bukanlah orang sembarangan.

Harus diketahui, bahwa Fuad Amin merupakan satu-satunya aktor dengan kekuatan besar yang nyaris tidak satupun aktor lain yang berani untuk melakukan konfrontasi terhadap kekuasaannya. Modal sosial selaku orang kuat lokal yang terlebih dulu Fuad pegang, yang kemudian Fuad manfaatkan sebesar-besarnya untuk masuk ke arena politik formal, telah membangun aspek kekuatan politiknya semakin berlipat-lipat.

Dengan demikian, dengan kepemilikan lewat dua kekuatan ganda, baik formal maupun informal, kontan telah memberikan peluang dan kesempatan bagi dirinya untuk memperluas dominasinya di masyarakat, di samping upaya yang sama yang juga Fuad lakukan untuk memperkecil kesempatan politik kepada pihak lain di luar dirinya. Setelah akumulasi dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

modal kekuatan politik Fuad Amin semakin mantap, meluap di segala sektor, baik yang berasal dari elemen-elemen kultural di satu sisi, maupun elemen struktural formal di sisi lain, tentu bukanlah hal yang sulit bagi Fuad untuk membangun otoritas serta dominasinya ke dalam segala bentuk formula yang menyangkut bagi-bagi posisi struktural politik lokal di Bangkalan. Politik seakan-akan menjadi arena monopolistik kekuasaan yang bisa dibentuk sesuka hatinya. Konsep Gramsci tentang hegemoni adalah bahwa suatu kelas dan anggotanya menjalankan kekuasaan terhadap kelas-kelas di bawahnya dengan cara kekerasan dan persuasi,[1] yang meliputi beberapa sektor, yaitu:

1. Pada Sektor Biokrasi dan Legislatif

Birokrat-Legislatif adalah koalisi Bupati (sekarang mantan bupati) Bangkalan dengan beberapa Kiai Bani Kholil yang duduk sebagai anggota Dewan. Dalam kondisi kekuasaan yang terpusat pada Kiai Bani Kholil yang mendapat dukungan Birokrat – Legislatif inilah Budaya Politik yang berkembang adalah Otoritarianisme.

. Istilah ini menunjuk pada suatu keadaan saat kekuasaan yang besar menggumpal pada satu orang atau kelompok yang memungkinkan baginya untuk mendominasi segala proses pengambilan keputusan.[2]

Salah satu dinasti politik yang saat ini mendapatkan sorotan khusus di antaranya adalah dinasti Fuad Amin di Bangkalan. Fuad adalah mantan

[1] Roger Simon, *Gagasan-gagasan Politik Gramsc.* Terj. Kamdani dan Imam Baehaqi. (Yogyakarta: Insist, 1999), 19-20

[2] Munir,Mutmainnah. *Kiai Dan Dinamika Politik Lokal di Kabupaten Bangkalan dan Sumenep, Madura Dalam Desentralisasi, Globalisasi dan Demokrasi Lokal* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2005), 227.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bupati Bangkalan yang selama dua periode berturut-turut memenangkan kontestasi pilkada. Setelah dua periode memimpin Bangkalan, di tahun berikutnya ia mencalonkan diri sebagai anggota DPRD, dan terpilih. Kemudian Fuad Amin didaulat untuk menjadi ketua DPRD Bangkalan. Anaknya, di periode yang sama, berhasil pula menjadi Bupati Bangkalan, meneruskan estafet kepemimpinannya. Dalam periode tersebut, anak dan ayah sama-sama menguasai dua sektor paling krusial, eksekutif dan legislatif.

Dalam kultur masyarakat Madura, penghormatan kepada kiai diposisikan pada tempat yang tinggi setelah penghormatan mereka kepada orang tua. Budaya ini tampak pada istilah setempat "*Buppa Bappu Guru Ratoh*".Artinya, pertama-tama hormat dan patuh kepada ibu dan bapak, kemudian kepada kiai, baru terakhir kepada para pemimpin pemerintahan. Disamping itu, kultur masyarakat Madura yang kental lainnya adalah, akan menganggap setiap keturunan dari (anak-anak kiai) sebagai orang yang mewarisi segala laku kekiaian dari ayahnya. Kultur ini pada akhirnya membentuk pola aura kharisma yang tidak pernah putus.Sebab masyarakat yakin, setiap keturunan yang berasal dari kiai, guru mereka, juga meneruskan bentuk rupa karomah serta berkah orang tuanya kepadanya.

> "..... Kalau berguru kepada ini jangankan anaknya, ayamnya saja dianggap guru, kan ada doktrin seperti itu, iya itu sangat tertanam sekali. Nah dengan beberapa watak tadi itu gak bisa kemudian mereka mau punya nalar kritis apalagi mau bergerak, berpikir aja mereka dan gak berani kritis."[3]

[3]Hasil Wawancara dengan Mathur Khusairi pada tanggal 05Januari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kharisma Fuad sendiri tidak terlepas dari posisinya sebagai keturunan kiai Besar.Fuad adalah cucu dari Syaikhona Kholil dan anak dari kiai Amin Imron. Dengan modal Kharisma Syaikhona Kholil dan Kiai Amin (yang merupakan elit penting di Bangkalan), juga dengan kultur masyarakat yang hormat pada kiai serta keturunannya, maka sudah dipastikan bahwa hal tersebut betul-betul dapat mempengaruhi dan membenarkan semua perilaku Fuad.

2. Pada Sektor Yudikatif (Lembaga Hukum)

Melalui konsep hegemoni, Gramsci beragumentasi bahwa kekuasaan agar dapat abadi dan langgeng membutuhkan paling tidak dua perangkat kerja. *Pertama*, adalah perangkat kerja yang mampu melakukan tindak kekerasan yang bersifat memaksa atau dengan kata lain kekuasaan membutuhkan perangkat kerja yang bernuansa *law enforcemant*.[4] Itulah yang dilakukan oleh Fuad Amin, karena beliau dikelilingi oleh orang-orang loyal, sekaligus ditakuti oleh para kelompok penentang. Tak jarang unsur-unsur kekerasan, intimidasi, praktik suap, dan sabotase politik mewarnai jalannya pemerintahan selama kepemimpinannya. Ketakutan kolektif telah menjadi gejala umum masyarakat Bangkalan. Kondisi tersebut telah mempermudah Fuad Amin dalam membangun serta membentuk dinastinya tanpa hambatan yang komplesk. Keajegan dinasti politik Fuad Amin yang hingga saat ini masih terlihat jelas di arena politik lokal Bangkalan, tidak bisa dilepaskan begitu saja dari manajerial

[4] Antonio Gramsci, *Catatan-catatan dari Penjara*,Terj. Teguh Wahyu Utomo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 289

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bangunan praktik-praktik kriminal yang Fuad lakukan. Permasalahan inti ini bukan hanya tiadanya kelompok oposisi yang setara yang mampu mengimbangi segala bentuk kapasitasnya menguasai kelompok-kelompok civil yang ada, melainkan juga disebabkan tiadanya lembaga hukum independen yang berani mengusik sikap-sikap inkonstitusional yang kerap dilakukan oleh Fuad. Semenjak pertama kali Fuad Amin menjabat sebagai bupati, para kroni dan keluarga yang berjasa kepada proses pemenangannya, perlahan-lahan Fuad masukan ke dalam struktur pemerintahan. Sebagian yang lainnya Fuad bantu dalam penguasaaan ormas-ormas di Bangkalan.

Banyaknya kasus kekerasan yang menimpa para aktivis di Bangkalan tidak lantas membuat kepolisian tergerak untuk mengungkapnya secara tuntas. Rata-rata kasus kekerasan yang masuk pada laporan kepolisian berhenti di tengah jalan atau bahkan mungkin tidak disentuh sama sekali. Hal yang sama pun terjadi dalam berbagai kasus korupsi yang Fuad Amin lakukan.

> ".....Mana ada polres itu ngungkap kasus korupsi Bangkalan, selama Fuad Amin menjabat. Mana ada itu kejaksaan, gak ada. Semuanya tidur."[5]

Ini merupakan sebuah fakta, karena sampai saat ini, baik kasus korupsi maupun kasus kekerasan yang terjadi tidak pernah terungkap siapa saja pelakunya dan apa motif di belakangnya. Terungkapnya kasus korupsi Fuad belakangan ini, lebih diinisiasi karena kinerja KPK dari pada

[5] Hasil Wawancara dengan Nur Hakim, S.Pd. I., M.Ag. pada tanggal 02 Januari 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lembaga hukum setempat.

Ada dua indikasi yang mengarah pada kinerja kepolisian dan kejaksaan di Bangkalan yang terkesan monoton. Pertama, bisa jadi mereka masuk ke dalam gerbong Fuad Amin, kedua mereka merasa ciut jika berhadapan dengan Fuad Amin. Rasa takut ini dapat bermacam-macam bentuknya, bisa saja rasa takut ini uncul akan adanya mutasi atau dipindah-tugaskan atau turun pangkat yang dapat dilakukan kapan saja oleh atasan mereka yang memiliki kedekatan dengan Fuad Amin. Bahkan beredar rumor, mereka adalah orang-orang belian Fuad Amin.

> "Cuma gini, ada juga rasa ketakutan kepolisian, sama aja dengan kapolres iya kan, kalau kemudian menjabat ke sini ada yang juga bahasanya orang-orang (rumor ini), ini dibeli gitukan, diminta untuk menjadi kapolres sini,ada juga kalau dia macam-macam nanti bakal dimutasi, rasa ketakutan itu kan ada setiap pejabat itukan. Nah, mungkin itu bagi mereka."[6]

Padahal laporan atas adanya tindakan penyelewengan wewenang Fuad Amin berkali-kali sempat dilaporkan oleh masyarakat. Tapi lagi-lagi laporan tersebut hanya mentok di kepolisian dan kejaksaan.

> ".....Nah, di dalam periode kedua ini saya melihatnya lebih parah lagi dari periode pertama, tidak hanya kebijakan yang tidak pro rakyat, tapi korupsinya ini sudah sedemikian rupa menggurita. Dan itu sudah kita tahu, data itu kita punya. Kita sudah coba masukan ke laporkan ke pihak aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian dan kejaksaan, tapi itu selalu mentok dan tidak, tidak ada ruang pintu untuk masuk. Entah bagaimana caranya...."[174]
>
> ".....akhirnya kita dapatkanlah data terkait pengungsi, pengungsi Sambas, dengan korupsi ijazah palsu kita dapatkan waktu itu, dan termasuk korupsi-korupsi APBD. Banyak kita melaporkan di polres maupun kejaksaan tapi ini tidak bisa terungkap, ada apa di balik

[6] Hasil Wawancara dengan Nur Hakim, S.Pd. I., M.Ag. pada tanggal 02 Januari 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini, gitukan, sebelasan kasus itu."[175]

Dengan kinerja kepolisian dan kejaksaan yang monoton, tidak berfungsi, dan tidak berani mengungkap segala kasus yang berkaitan dengan Fuad Amin, akhirnya membuat kedua intsansi tersebut oleh masyarakat disebut sebagai dinas kepolisian dan dinas kejaksaan. Label ini secara eksplisit menggambarkan bahwa keberadaan lembaga kepolisian dan kejaksaan tidak lebih hanya sekadar sebagai fasilitator bagi munculnya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Fuad Amin menjadi semakin luas. Mereka seolah-olah tidak memiliki tanggungjawab atas penyimpangan yang dilakukan oleh Fuad, sehingga wajar bila ada anggapan yang muncul di masyarakat seakan-akan mereka berada di bawah koordinasi langsung Fuad Amin.[176] Bukan malah sebaliknya, yang semestinya mengontrol jalannya pemerintahan. Karena dengan tiadanya tindakan yang dilakukan, segala bentuk laporan tersebut hanya sia-sia.

> ".....Makanya di Bangkalan itu sampai terkenal ada istilah kepala dinas kepolisian, kepala dinas kejaksaan, karena begitu rupanya dua institusi penegak hukum ini seakan-akan ada di bawah koordinasi eksekutif, bukan bergerak sendiri."[7]

Bahkan suatu waktu Mathur Khusairi (korban penembakan) pernah mengajukan usul kepada kasatreskim setempat agar segala kasus kekerasan yang menimpa aktivis Bangkalan untuk di SP-3 kan saja. Tapi nyatanya hal tersebut tetap urung dilakukan, karena menurut pihak

[7] Hasil Wawancara dengan Nur Hakim, S.Pd. I., M.Ag. pada tanggal 02 Januari 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepolisian, bisa saja suatu hari dominasi Fuad Amin akan hilang, dan mereka akhirnya dapat melakukan tindakan.

> "Semua kasus kekerasan terhadap aktivis di Bangkalan tak satupun yang terungkap. Saya pernah ngomong ke kasatreskrim apa kasat intel ya dulu, pak ini kasus kekerasan terhadap aktivis ini kenapa gak dihentikan saja di sp-3kan saya bilang. Inikan menjadi tunggakan kepolisian, kalau di-sp3kan kita juga, dan ini kami yang mohon gitu. Kenapa enggak di-sp3kan. Mereka jawabnya: Gak bisa mas, siapa tahu nanti Fuad sudah gak ada, kita bisa nindak lanjuti ini."[8]

Tapi tidak semua penegak hukum di Bangkalan berpaling muka atas segala tindakan penyimpangan dan penyelewengan yang dilakukan oleh Fuad. Menurut pengakuan beberapa aktivis, pernah ada juga kapolres Bangkalan di masanya Sulistyono yang sangat apresiat dan mendukung gerakan-gerakan yang dilakukan oleh para akivis dalam melakukan kontrol terhadap pemerintahan Fuad. Perhatian dia terhadap penanganan kasus korupsi pun begitu besar. Sayangnya, 4 bulan setelah penangkapan Fuad oleh KPK, dia harus dipindahtugaskan ke Pasuruan.

> ".....Kalau Pak Sulis inikan intens, kalau seminggu sekali, seminggu dua kali, ngajak ketemu sama kita, ngajak bahas Bangkalan seperti apa. Jadi keinginan untuk membongkar korupsi itu ada. Dan minimal punya rencana gitulah."[9]

3. Kondisi Umum Masyarakat Bangkalan

Gambaran umum yang melekat pada kehidupan orang-orang Bangkalan adalah kehidupan mereka yang dekat dengan dunia pesantren.

---

[8] Hasil Wawancara dengan Nur Hakim, S.Pd. I., M.Ag. pada tanggal 02 Januari 2018

[9] Hasil Wawancara dengan Nur Hakim, S.Pd. I., M.Ag. pada tanggal 02 Januari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kultur religi menjadi ikhwal yang penting dan inheren, dan tidak terpisahkan dari kehidupan mereka sehari-hari. Hal ini bisa dilihat dari maraknya pesantren-pesantren yang bermunculan di Bangkalan. Bahkan Kuntowijoyo menyebut kota ini sebagai kota "seribu pesantren" yang tentunya banyak didiami oleh para santri.

Santri sebagaimana umumnya, adalah kalangan yang menaruh rasa hormat dan takdzim yang besar kepada kiai mereka. Kiai adalah guru-guru mereka. Kiai disimbolkan sebagai orang yang suci yang memiliki banyak mitos tentang kekuatan gaib. Kiai mempunyai nilai *baraqa* yang hanya bisa didapatkan oleh masyarakat melalui penghormatan kepadanya lewat ritual-ritual tertentu, misalnya melalui mediasi cium tangan (salaman) atau dengan ziarah ke makam para leluhur kiai yang telah dulu meninggal dunia. Kecintaan masyarakat yang besar kepada para kiai secara tidak langsung, telah mengkontruksi sebuah tatanan masyarakat yang memposisikan kiai di strata paling atas.[10]

Dalam strata sosial masyarakat Madura, posisi kiai ditempatkan pada posisi yang tinggi. Fakta ini sebenarnya tidak berbeda jauh dengan kondisi yang ada di berbagai wilayah lain di Indonesia pada umumnya. Kiai adalah aktor penting dalam sejarah pergerakan nasional, sehingga secara otomatis kberadaannya dalam hirarki sosial begitu tinggi. Kiai merupakan salah satu aktor penggerak basis massa. Perannya di masa awal pra-kemerdekaan telah membuktikan hal tersebut. Keikutsertaan

[10] Ahmad Nurcholis, "Mitos Kiai Suci," artikel diakses pada tanggal 27 Desember 2017 dari tp://islamlib.com/gagasan/mitos-kiai-suci/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kiai dalam berbagai perlawanan memperjuangkan kemerdekaan, dan keikutsertaan mereka memimpin pemberontakan kepada penguasa yang lalim, tidak sulit untuk menjadikan para kiai sebagai panutan rakyat yang sangat dihormati. Rakyat dari zaman ke zaman, menganggap kiai adalah guru mereka sekaligus orang tua mereka. Segala perkataan dan nasihatnya dianggap karomah dan berkah yang wajib diamini.

Secara sosiologis peran ulama di tengah-tengah masyarakat, khususnya pada komunitas santri, menjadi posisi yang sangat diistimewakan. Mereka dihormati dan nasehat-nasehatnya dipatuhi. Status ekonomi-sosial mereka beragam, meski pada umumnya berasal dari kelompok bangsawan kaya yang memiliki hamparan tanah yang luas. Akumulasi dari statussosial ditopang kekayaan dan ilmu pengetahuan agama yang luas menjadikan ulama sebagai pemimpin kharismatik yang disegani. Kekuatan lain yang melekat pada fogur ulama, terletak pada kehalusan dan kemampuan menafsirkan paham yang dianut yang kemudian membuat mereka benar-benar sanggup melakukan peran yang oleh Geertz disebut sebagai cultural broker,[11] Yaitu menjembatani transformasi nilai-nilai kultural yang berkembang di masyarakat. Dari kelebihan ulama semacam itulah yang membuat mereka terlibat dalam kepemimpinan masyarakat dan terjun dalam dunia politik.

Kepemimpinan kiai dibagi menjadi empat dimensi diantaranya: Pertama, kepemimpinan ilmiah, di mana seorang kiai dipandang

[11] Nurul Azizah, *Artikulasi Politik Santri: dari Kiai menjadi Bupati,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai kecerdasan dan pengetahuan di atas rata-rata masyarakat pada umumnya. Kedua, kepemimpinan spiritual, seorang kiai membimbing masyarakat dan santri melalui tasawuf dan tarekat. Ketiga, kepemimpinan sosial, seorang kiai menjadi tokoh masyarakat. Keempat, kepemimpinan administratif, di mana seorang kiai memimpin sebuah institusi seperti pesantren dan organisasi yang lain.[12]

Kiai atau Pengasuh Pondok Pesantren merupakan elemen yang sangat esensial bagi suatu pesantren. Rata–rata pesantren yang berkembang di Jawa dan Madura sosok kiai begitu sangat berpengaruh kharismatik dan berwibawa, sehingga amat disegani oleh masyarakat dilingkungan pesantren. Menurut asal muasalnya sebagaimana dirinci zamakhsyari dhofier, perkataan kiai dalam bahasa jawa dipakai untuk tiga jenis gelar yang saling berbeda. Pertama, sebagai gelar kehormatan bagi barang-barang yang dianggap sakti dan kramat misalnya kiai garuda kencana dipakai untuk sebutan untuk kereta emas yang ada dikeraton yogyakarta, kedua sebagai gelar kehormatan bagi orang-orang tua pada umumnya, ketiga sebagai gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang ahli agama islam yang memiliki atau menjadi pimpinan pesantren.[13]

Istilah kiai pada umumnya dipakai oleh masyarakat jawa untuk menyebut orang alim, bentuk jamak alim dalam bahasa arab adalah

[12] Yasmadi, Modernisasi Pesantren (Jakarta: Ciputat Press, 2002),63.

[13] Amin Haedari & Abdullah hanif, *Masa Depan Pesantren dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Kompleksitas Global*, (Jakarta : IRD Press, 2004), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ulama dalam tradisi masyarakat muslim. Kiai biasanya memiliki kharisma dan pada umumnya memimpin sebuah pesantren, mengajarkan kitab klasik atau kitab kuning dan memiliki keterikatan dengan islam tradisional.[14]

Kiai adalah sosok yang penuh dengan aura kharismatik tinggi serta menempati posisi tinggi (*high class*) dalam strata sosial utamanya bagi umat Islam. Sehingga tidak heran jika segala yang di ucapkan diyakininya (sami'na waatho'na).Disisi kiai bisa dibilang memiliki peranan penting dalam kehidupan beragama masyarakat yang tidak mungkin bisa lepas dari dogma-dogma agama sebagai pedoman hidup masyarakat.Hal itu disebabkan karena masyarakat percaya bahwa kiai adalah sosok yang mempuni dalam ilmu keislaman. Dari realitas inilah diakui atau tidak sosok kiai memiliki power serta otoritas tinggi untuk memobilisasi massa.

Kiai adalah orang yang memiliki lembaga pondok pesantren dan menguasai pengetahuan agama serta secara konsisten menjalankan ajaran-ajaran agama. Tetapi ada lagi sebutan kiai yang ditunjukan kepada mereka yang mengerti ilmu agama, tanpa memiliki pondok pesantren atau tidak menetap dan mengajar dipondok pesantren. Kiai yang terakhir ini mengajarkan pengetahuan agama dengan cara berceramah dari desa

[14] Achmad Patoni, *Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedesa, menyampaikan fatwa agama kepada masyarakat luas.[15]

Kiai adalah sebagai pengajar dan penganjur dakwah Islam (preacher) dengan baik.Ia juga mengambil alih peran lanjut dari orang tua, ia sebagai guru sekaligus pemimpin rohaniah keagamaan serta tanggung jawab untuk pekembangan kepribadian maupun kesehatan jasmaniah anak didiknya. Dengan otoritas rohaniah, sekaligus menyatakan hukum dan aliran-alirannya melewati kitab-kitab Islam klasik yang diajarkan di pesantren binaannya. Para Kiai berkeyakinan bahwa mereka adalah penerus dan pewaris risalah nabi, sehingga mereka tidak hanya mengajarkan pengetahuan agama, tetapi juga hukum dan praktek keagamaan, sejak dari hal yang bersifat ritus sampai perilaku sehari-hari. Keberadaan Kiai akan lebih sempurna apabila memiliki masjid, pondok, santri, dan ia ahli dalam mengajarkan kitab-kitab Islam.

Dalam tatanan masyarakat Bangkalan, kiai digolongkan dalam kelompok elit, yang mana memiliki pengaruh kekuasaan ditingkat lokal baik secara formal maupun non-formal. Dikatakan formal jika kiai menduduki posisi jabatan secara administratif seperti jabatan eksekutif dan legislatif. Contoh konkrit kiai menduduki jabatan formal ketika Kiai Fuad Amin menjabat sebagai bupati di kabupaten Bangkalan, atau Kiai Syafik Rofii yang menjabat sebegai wakil bupati Bangkalan.

Ciri-ciri keulamaan, atau kekiaian di wilayah Madura di antaranya adalah dia adalah seorang guru agama yang dianggap tinggi

[15] Nurul Azizah, *Artikulasi Politik Santri: dari Kiai menjadi Bupati*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ilmu pengetahuan agamanya oleh masyarakat. Ketinggian ilmunya ini kemudian menjadikan kiai tersebut menjadi daya tarik yang kuat dari masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke pesantren tersebut.

Selain faktor keilmuan, karakteristik yang kuat dalam diri kiai sebagai ciri khas kepribadiannya, juga menjadi aspek yang tidak bisa dipisahkan dari pengakuannya terhadap kapasiitas dan kapabilitas kekiaiannya. Dalam persepsi masyarakat Madura, sosok kiai adalah sosok dengan segenap sifat-sifat dan karakter istimewa, yang membedakan antara kiai dengan masyarakat pada umumnya. Sifat istimewa ini melekat kuat dan menjadi bagian tidak terpisah dari kehidupan kiai sehari-harinya. Inilah yang memperkokoh *conition* (pengakuan) masyarakat terhadap sosok kiai di Madura.

Aspek lain yang makin memperkokoh pengakuan masyarakat Madura terhadap seorang kiai adalah kiai tersebut telah menunaikan ibadah haji. Rukun Islam yang kelima ini memiliki makna yang sangat signifikan dalam konstruksi sosial masarakat Islam Indonesia.

Termasuk masyarakat Madura. Seorang kiai yang belum menunaikan ibadah haji tentu akan berbeda pengaruhnya di masyarakat dibandingkan dengan kiai yang telah menunaikan rukun Islam yang kelima ini.

Hal esensial lainnya yang makin memperkokoh kekiaian adalah mempunyai atau memimpin sebiah pesantren. Ini aspek penting yang menentukan kapasitas dan kapabilitas kekiaian. Istilah kiai memang tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya merujuk pada sosok yang memiliki pesantren, tetapi juga bisa melekat kepada tokoh agama, atau tokoh yang memperoleh pengakuan dari masyarakat. Tetapi pengakuan ini belum sempurna manakala kiai tersebut belum memangku pesantren. Adanya pesantren merupakan bukti otentik tentang kapasitas, kualitas, dan legitimasi terhadap kekiaian. Dengan demikian, tinggi dan rendahnya kualitas keulamaan atau kekiaian dapat diukur dari seberapa banyak santri yang berukim dipondok pesantren seorang kiai.

Parameter ini sebenarnya bukan para menter tunggal, tetapi sebagai salah satu para meter yang cukup signifikan. Dan kondisi ini tidak hanya terjadi, atau berlaku pada masa sekarang ini saja, tetapi sudah berlangsung lama, semenjak masa-masa awal tumbuh dan berkembangnya kehidupan pesantren.

Paparan ini menunjukkan betapa kiai yang populer menjadi rujukan masyarakat hampir dalam setiap segi kehidupan. Banyaknya santri, bahkan dalam jumah ribuan, juga merupakan ha yang luar biasa dalam konteks masa penjajahan, karena masa itu, peluang dan kesempatan untuk studi yang cukup terbatas.

Keterlibatan kiai dalam kancah politik bisa ditelusuri dari kolonialisme Belanda di Indonesia dan mencapai puncaknya ketika Belada mengambil kebijakan yang telah mengganggu kehidupan rakyat Indonesia. Kiai ikut serta ke dalam kancah poitik pada masa itu terutama karena diminta oleh rakyat, dalam ha ini rakyat petani. Rakyat meminta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perlindungan kiai sehubungan dengan perilaku elit-elit lokal yang telah menjadi bagian dari struktur birokrasi pemerintahan kolonial Belanda. Sebagai bawahan, atau bagian birokrasi penjajah, para elit lokal justru menindas kehidupan ekonomi rakyat kecil (petani).

Munculnya berbagai organisasi pergerakan nasionalpun, faktanya, juga tidak terlepas dari campur tangan para kiai. Sebagai salah satu agen sosial, kiai adalah orang-orang terdidik yang hidup bersama keluh kesah dan berbaur langsung dengan rakyat. Inilah yang membedakan kiai dengan agen sosial lainnya yang terkesan menjaga jarak dan jauh dengan rakyat. Tidak sulit kiranya bagi mereka menaruh tempat di hati rakyat.

Pada kasus Madura, dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, kiai memiliki fungsi sosial strategis dalam kehidupan di dalamnya. Mereka sering dimintai pendapat untuk berbagai macam persoalan. Bukan saja persoalan yang berkaitan dengan aspek agama, bahkan untuk masalah-masalah remeh-temeh sekalipun, kiai tidak absen dimintai masukan. Saat musim pemilu tiba misalnya, banyak orang-orang dari elit pemerintah yang datang untuk sekedar mohon restu dan minta doakan supaya menang dalam pemilihan, atau para pedagang yang mohon dimudahkan mencari rezeki saat berdagang. Sebenarnya masih banyak tradisi umum lainnya, yang bisa dibilang kurang *afdol* tanpa melibatkan kiai.

Image yang tertanam dalam benak masyarakat tentang kiai, menyimpan keutamaan penting bahwa ia adalah pusat pemecah setiap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah. Saluran bagi tercapainya setiap cita dan impian mereka. Kontribusi kiai yang besar dalam bidang pendidikan agama, etika moral, dan peran sosial di dalam masyarakat Madura, pada akhirnya sulit untuk tidak melibatkan kiai di berbagai sudut dimensi kehidupan mereka. Sebagaimana dikatakan oleh Muhammad Kosim dalam sebuah tulisannya di Jurnal Karsa:

> "Pengaruh kiai melampaui batas pengaruh institusi-institusi kepemimpinan lainnya. Dalam berbagai urusan umat, kiai menjadi tempat mengadu. Seperti urusan agama, pengobatan, rezeki, jodoh, membangun rumah, bercocok tanam, konflik sosial, karier, politik, dan sejumlah problema hidup lainnya. Belum mantap rasanya apabila segala urusan tidak dikonsultasikan kepada kiai dan belum mendapat restu darinya. Kiai melayani kebutuhan umat dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, umatpun merasa puas. Dan sebagai "imbalannya" umat akan patuh, tunduk, dan siap mengabdi kepada kiai. Hubungan antara kiai dan umatnya ─ sebagaimana digambarkan di atas─ dikenal dengan pola paternalisme, di mana hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin (atasan-bawahan) seperti hubungan antara ayah dan anak."[16]

Dari waktu ke waktu, dengan semakin besarya pengaruh dan peran kiai di Madura, banyak di atara mereka, untuk kemudian hari terjun ke dunia politik. Keterlibatan para kiai dalam politik prosedural ini, adalah sarana memanfaatkan modal sosial yang sudah mereka miliki. Kepercayaan dan rasa hormat masyarakat yang sudah mereka genggam, digunakan sebaik-baiknya oleh para kiai dalam melihat peluang mereka yang sangat strategis untuk menjadi pemimpin formal. Transformasi kiai, dari pemimpin informal menjadi formal, setidaknya telah mengkristalkan

[16] Muhammad Kosim, "Kiai dan Blater: Elit Lokal dalam Masyarakat Madura", *Jurnal Karsa*, Vol. XII No. 2, Oktober, 2007, 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekuatan dan kekuasaan mereka menjadi semakin luas. Karena kekuasaan legal-formal yang mereka dapat dari panggung demokrasi prosedural, ditambah kharisma yang mereka miliki di mata masyarakat, yang didapat melalui perannya sebagai agen sosio kultural, menjadikan kekuatan para kiai berlipat-lipat besarnya. Kini mereka bukan hanya dinisbatan sebagai pemimpin informal saja melainkan sebagai pemimpin formal sekaligus. Untuk itu, sisi negatif dari keikutsertaan kiai dalam persoalan politis adalah melemahnya civil society dalam rangka mengawasi peran serta kinerja pemerintah. Ada rasa tidak enak yang menjangkiti masyarakat untuk melakukan protes tatkala mereka (para kiai) melakukan kesewenang-wenangan dalam tugas mereka sebagai pemimpin formal baru. Sehingga situasi seperti ini mirip dengan sejarah eropa zaman pertengahan, di mana agama memainkan peran sebagai otortasabsolut yang jauh dari kritikan.

Di sisi yang lain dalam masyarakat Madura (dalam hal ini di Bangkalan), ada yang dinamakan dengan Blater. Blater merupakan gambaran praktek kekerasan yang terjadi di tingkat lokal dalam hal ini terjadi di Madura. Kondisi ini sama halnya dengan fenomena jawara yang terjadi di Banten. Baik blater maupun jawara, merupakan lokalitas prakte kekerasan yang marak terjadi di belahan wilayah Indonesia. Ragam kekerasan yang mewarnai dinamika sosial masyarakat daerah, identik dengan eksistensi preman lokal. Kewenangan yang mereka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

punyai kurang lebih berasal dari berbagai intimidasi, pemalakan, kerusuhan, dan pembunuhan yang kerap kali mereka lakukan.

Penisbatan Balter pada diri seseorang dinilai dari seberapa berani ia melakukan upaya carok. Meskipun carok bukanlah satu-satunya arena legitimasi keblateran bisa didapatkan. Ada arena-arena lainnya di mana pelegitimasian keblateran muncul seperti:"kedekatan seseorang dengan tradisi kerapan sapi, sabung ayam, jaringan kriminalitas dan remoh blater."[17] Tetapi tetap budaya carok meruakan budaya yang menyangkut erat soal harga diri dan prinsip orang Madura. Sedikit saja harga diri orang Madura ternodai, maka tak segan orang-orang ini melakukan upaya carok. Bahkan tendensi adanya paradigma semacam ini tergambar jelas dalam peribahasa setempat yang penulis kutip langsung dari Abdur Rozaki: "ango'an pote tolang etembeng pote matah, artinya lebih baik putih tulang dari pada putih mata. 'hidup itu tidak ada maknanya kalau kehilangan harga diri."[18]

Pengindentikan Blater hanya dengan kekerasan di satu titik tidak selamanya menjadi dominasi di Madura. Kultur Madura yang agamis, nyatanya juga telah menuntut reproduksi Blater dengan ciri khas tertentu. Adanya hubungan yang saling mengisi antara kekerasan di satu sisi, dan regiusitas di sisi lain. Maka, dalam kasus Madura, Blater dapat tumbuh dan muncul dari segala aspek strata sosial,baik dari kalangan masyarakat sipil biasa maupun santri. Sebuah diametral yag saling berveda tentunya,

[17] Abdur Rozaki, "Sosial Origin dan Politik Kuasa Blater di Madura," 2.

[18] *Ibid.*, 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tapi dalam realita sosial di lapangan, tak jarang peristiwa ini terjadi: jiwa blater dan santri hadir pada diri seseorang sekaligus. Dan tak jarang antara Blater dan Kiai terjalin relasi ekonomi-politik bersama yang saling menguntungkan satu sama lain.[19] Sebagaimana yang ditulis oleh Abdur Rozaki:

> "Kedua aktor ini dalam praktek sosialnya, terkadang saling berseberangan paham dan visi. Namun, dalam konteks tertentu tak jarang pula saling menjalin relasi kultural, ekonomi, dan politik kuasa. Dalam konteks inilah citra simbolik kekerasan dan religiusitas saling berkelindan dan berdialektika dalam ruang-ruang sosial masyarakat Madura."[20]

Penghormatan masyarakat Bangkalan kepada kiai-kiai mereka, nyatanya tetap terus berlanjut sampai kepada para keturunannya. Hal ini tidak terlepas dari budaya masyarakat di Bangkalan yang mempercayai bahwa seorang anak kiai sudah pasti akan menjadi kiai. Sebab sang anak mewarisi trah darah biru.[21] Maka tak aneh bila rata-rata keturunan keluarga besar Syaikhona Kholil menyandang predikat sebagai kiai atau lora.[22] Dengan kemuliaan yang dimiliki oleh Syaikhona Kholil sebagai ulama besar dan guru bagi kebanyakan ulama di nusantara, akhirnya, seluruh keturunannya ikut mewarisi kemuliaan beserta nama besarnya.

> ".....Kaya menjadi sebuah stigma positif bagi mereka bahwa anaknya kiai pasti akan jadi kiai. Dan anaknya orang awam ndak bakalan jadi kiai. Kan gitu. Karena ada trah darah biru itu, bahasa

[19] *Ibid.*, 3.

[20] *Ibid.*, 3.

[21] Hasil Wawancara dengan Mathur Khusairi pada tanggal 05 Maret 2018.

[22] Hasil Wawancara dengan Mathur Khusairi pada tanggal 05 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka."[23]

Sayangnya, penghormatan ini semakin bias tatkala kiai terjun ke dunia politik. Dunia politik yang cenderung dipenuhi oleh segala macam siasat dan perilaku koruptif para aktornya, menyulitkan pembelahan sosiologis kiai sebagai alim, ulama, dan guru di satu sisi, dengan kiai sebagai politisi murni di sisi yang lain. Kesulitan memisahkan dua elemen yang berlainan dalam satu tubuh kiai ini kemudian berdampak pada absennya kontrol masyarakat terhadap para kiai yang terlanjur terjun ke dunia politik. Karena budaya kekiaian yang hierarkis dan keberlakuan budaya tanpa kritik di dalamnya, telah mengkonstruksi pribadi kiai dan masyarakat untuk bagaimana bersikap. Di satu sisi kiai merasa paling superior, di sisi lain masyarakat merasa tidak pantas untuk menasehati kiai lewat kritik yang mereka sampaikan. Sebab, sekalipun kalangan kiai terjun ke dunia politik, embel-embel kekiaiannya akan tetap melekat dan tak akan pernah hilang.

> ".....Rupanya Bangkalan ini memang agak susah gitu kan, ya karena SDM, kepala desa dan pejabatnya juga, yang mereka ini istilahnya punya bupati yang tipikal kiai agak susah, karena kiai ini kan tahunya nyuruh, gitu. Enggak bisa mau dikritisi, enggak boleh dikritisi kalau kiai, nah itu bedanya dengan bupati dengan kiai.....[24]

Secara kelembagaan, gelar kiai yang disandang oleh seseorang tentu mencerminkan dalamnya sikap-asketis bagi diri yang bersangkutan. Kesucian, dan terjaga dari sikap-sikap tercela merupakan pantulan laku

[23] Hasil Wawancara dengan Mathur Khusairi pada tanggal 05 Maret 2018.

[24] Hasil Wawancara dengan Mathur Khusairi pada tanggal 05 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kiai di masyarakat. Sehingga anggapan bahwa kiai tidak mungkin melakukan kesalahan dan terbebas dari segala dosa menjadi kondisi umum yang terjadi di masyarakat. Apalagi kepatuhan yang ditunjukan oleh masyarakat kepada kiai dengan sendirinya akan membentuk perasaan takut dan khawatir tertimpa *tulah/kwalat* bila berhadapan dan berani melawan kalangan kiai. Maka menjadi kaprah bila impak dari adanya anggapan ini adalah lahirnya rasa enggan untuk memberikan kritik terhadap para kiai. Khususnya terhadap mereka-mereka yang menduduki jabatan publik.

Gambaran tersebut merupakan fenomena lumrah yang terjadi di Bangkalan era reformasi. Representasi kiai yang terjun ke dunia politik era reformasi dapat dilihat dari sepak terjang Fuad Amin. Fuad Amin yang mendapatkan gelar RKH (Raden Kiai Haji) tidak terlepas dari posisinya sebagai keturunan Syaikhona Kholil dan anak kandung Kiai Amin. Kharisma yang terpancar dari diri Fuad Amin kurang lebih bersumber dari para leluhurnya ketimbang berasal dari cerminan perilakunya. Faktanya, meskipun Fuad berasal dari latar keluarga kiai, tidak mesti sikapnya mewarisi tindak-tanduk seorang alim kiai, bahkan kenyataannya, perilakunya sangat jauh dari nilai-nilai substantif agama. Hal ini dapat dilihat dari sepak terjangnya sebagai bupati yang dipenuhi oleh perilaku KKN dan tindak kekerasan yang dia lakukan.

Meskipun kepemimpinan Fuad Amin banyak diwarnai penyimpangan dalam berbagai sektor pemerintahan, faktanya tidak lantas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadikannya sebagai objek kritik masyarakat yang lebih masif. Masyarakat masih terbilang apatis. Kalaupun ada, itupun hanya dilakukan oleh sebagian kalangan dan jumlahnya sangat begitu kecil. Bahkan adanya kelompok penentang di Bangkalan, tidak sedikit yang kemudian hanya menjadi bahan cibiran masyarakat. Pasalnya pola berpikir masyarakat masih terkungkung dengan segala macam-macam mitos tadi: kwalat, patrimornial dan budaya mengkritisi kiai belum begitu populer di masyarakat.

> ".....pola pikir masyarakat yang masih terkontaminasi dengan patrialistik ya. Jadi jangankan mendengar namanya fuad yang kita lawan, mau kita ajak mereka untuk bergerak umpama, dengar kita ngotak-atik kekuasaannya fuad, kritik demo segala macam, mereka udah antipati dengan kita. Karena dianggap ini seorang kiai gitu loh yang gak pantas dilawan, gitu."[25]

Tapi semenjak Fuad Amin ditangkap oleh KPK, mulai meruak kabar bahwa masyarakat saat ini mulai sadar dan mereka tidak akan lagi mencari bupati dari silsilah kiai. Pengalaman Fuad Amin sebagai Kiai-Bupati dengan berbagai penyimpangan-penyimpangan yang dia lakukan sampai harus ditangkap oleh KPK, setidaknya telah mencoreng kalangan kiai secara keseluruhan. Wacana ini keluar sebagai bukti bahwa masyarakat Bangkalan masih mencintai kalangann kiai.[26]

> "Sangat. Karena apa sekarang ini, setelah kita (ini bahasa masyarakat) mereka saking cintanya kepada kiai, takut nama kiai itu tercoreng kembali, nah masyarakat sekarang ini yang sekarang ini tidak mau lagi, kayaknya tidak mau lagi jadi (bahasa-bahasa masyarakat di bawah) kalau mencari bupati jangan cari kiai. Kalau mau jadi bupati jangan

[25] Hasil Wawancara dengan Mathur Khusairi pada tanggal 05 Maret 2018.

[26] Hasil Wawancara dengan Mathur Khusairi pada tanggal 05 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> mencari kiai, dari kiai. Ini masyarakat yang bicara, ini jangan diartikan kami tidak suka pada kiai, saking cintanya masyarakat pada kiai, takut tercoreng seperti kondisi sekarang, akhirnya masyarakat punya inisiatif jangan mencari kiai, mencari orang biasa saja yang mampu untuk membangun Bangkalan ke depan, ya kalau kita dengar-dengar di lapangan seperti itu."[27]

4. Kondisi Civil Society pada saat Fuad Amin menjadi Bupati

Keadaan civil society sebelum Fuad Amin duduk di kursi bupati untuk pertama kali di Bangkalan sebetulnya masih sama rupa dengan kondisi sosial yang berlaku pada era sebelumnya, yakni adanya semacam dominasi terhadap masyarakat oleh kalangan kiai, atau masyarakat berada di bawah kendali alim-kiai secara langsung. Namun dengan tokoh sentralnya waktu itu adalah Kiai Abdullah Sachal, salah satu Ketua Dewan Syuro PKB.[28]

Sebelum Fuad Amin menjabat sebagai bupati definitif pada tahun 2003, bupati Bangkalan sebelumnya Mohammad Fatah. Dia berasal dari kalangan TNI dari matra angkatan laut. Seperti kondisi wilyah-wilayah lainnya di Indonesia, Fatah juga merupakan bagian yang terintegrasi dari unsur orde baru.[29] Fenomena transisi demokrasi dalam lanskap politik lokal di Bangkalan pasca Soeharto runtuh, yang memunculkan Fuad Amin sebagai pemimpin baru menggantikan Fatah, pada realitanya tidak menghasilkan sebuah tatanan yang lebih terbuka dan transparan, melainkan menghasilkan rezim yang kurang lebih mirip dengan pemerintahan orba. Sepadan dengan ide yang diungkapkan oleh

[27] Hasil Wawancara dengan Mathur Khusairi pada tanggal 05 Maret 2018.

[28] Hasil Wawancara dengan Mathur Khusairi pada tanggal 05 Maret 2018.

[29] Hasil Wawancara dengan Mathur Khusairi pada tanggal 05 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

O'Donnell dan Schmiter bahwa proses transisi hakikatnya dapat menghasilan bberapa bentuk; jika bukan keberhasilan ditegakkannya demokrasi politik, maka bisa jadi yang muncul adalah rejuvinasi kekuatan otoritarian lama atau bahkan lebih kejam dari pada yang sebelumnya, atau transisi bisa pula hanya sebatas rotasi kekuasaan tanpa memberikan solusi pada penyelesaian masalah kelembagaan. Hasil transisi kekuasaan politik di Bangkalan yang terjadi pasca Soeharto tumbang, justru mengarah pada pengekalan praktik hegemoni, meskipun aktor yang muncul merupakan pemain baru. Hal ini seperti diungkapkan oleh Mathur Khusairi:

> ".....Tahu bedanya Fuad Amin sama Soeharto, kalau Soeharto ini bisa mengkondisikan TNI, politiknya dia punya Golkar, kekuatan blaternya maupun penjaga dirinya dia punya TNI, satu. Dan dia juga punya kekuatan finansial yang sangat biasa. Bagi para pejabat yang ingin, dia juga punya kekuatan struktur. Ini kekuatannya Soeharto, kalau kultur saya kira ndak punya. Tapi kalau Fuad Amin, untuk kekuatan hukum, dia itu kejaksaan sama kepolisian, dia keok...."[30]

Di masa-masa awal kepemimpinan Fuad Amin di Bangkalan, eksistensinya sebagai bupati memang harus diakui cukup baik, karena Fuad mampu memberikan rasa nyaman kepada masyarakat. Lewat kharisma yang dia miliki, konflik sosial yang terjadi di kalangan masyarakat relatif bisa diredam. Misal salah satunya adalah konflik antar nelayan Koanyar dan Noreh yang terjadi akibat perebutan tempat. Konflik yang mengarah pada kekerasan dan praktik saling bunuh itu

[30] Hasil Wawancara dengan Mathur Khusairi pada tanggal 05 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akhirnya bisa diselesaikan oleh Fuad. Contoh lainnya adalah saat akan adanya pembakaran terhadap salah satu pondok di Serabi Barat oleh massa. Emosi massa bisa diredam setelah Fuad datang. Menurut AHS, aura dan kharisma Fuad Amin itu betul-betul ada. Sehingga gejolak yang terjadi di masyarakat dapat diselesaikan dengan begitu mudah oleh Fuad. Terlepas entah apa itu sekadar kontruksi sosial atau kesaktian, tapi hal itu memang betul-betul terjadi.[31]

Untuk memahami kondisi civil society di Bangkalan, ada beberapa hal yang sebelumnya mesti kita ketahui lebih dulu. Pertama, secara kultur Bangkalan merupakan kota agamis. Masyarakat Bangkalan menaruh perhatian yang tinggi pada permasalahan-permasalahan seputar agama. Perhatian yang tinggi pada aspek keagamaan ini pada akhirnya membawa masyarakat Bangkalan untuk menghormati segala simbol agama, termasuk penghormatan kepada para kiai. Kedua, tertanamnya kultur blater di lingkungan Bangkalan yang cenderung mempersembahkan penyelesaian masalah melalui unsur kekerasan. Dan kultur keblateran mau tidak mau dampaknya sangat terasa dalam setiap persoalan yang muncul dan menyangkut masyarakat.

B. Organisasi Sosial Kemasyarakatan

Institusi-institusi keagamaan, baik yang berbentuk ormas maupun yang berada di struktur pemerintahan juga menjadi ajang pemanfaatan Fuad

[31] Hasil Wawancara dengan Mathur Khusairi pada tanggal 05 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menandaskan kekuasaannya di Bangkalan. Nahdlatul Ulama, Majelis Ulama Indonesia dan Basra adalah 3 instansi yang seringkali dimanfaatkan oleh Fuad Amin. Tiga institusi keagamaan ini menjadi unsur elementer yang Fuad gunakan untuk segala kepentingan pribadinya. PCNU Bangkalan misalnya, sebagai orang yang memiliki latar keluarga NU, bahkan sebagai keluarga yang menelurkan embrio berdirinya NU, tentu menjadi hal yang penting bagi Fuad untuk menguasai ormas ini. Apalagi secara kultur, NU di Bangkalan sangat begitu kuat. Sedangkan organisasi masyarakat lainnya seperti Muhammadiyah dan Sarekat Islam secara itung-itungan massa masih kalah jauh dari massa NU di Bangkalan, makanya keberadaannya tidak menjadi prioritas dominasi Fuad Amin. Basis massa Muhammadiyah hanya terpusat di kecamatan Burneh, sedangkan SI hanya dapat dijumpai di kecamatan Kamal.[32]

Nahdlatul Ulama telah menjadi kultur serta ideologi yang mendarah daging dengan masyarakat lokal Bangkalan. Dengan menguasai NU Bangkalan, setidaknya Fuadtelah berada di barisan paling depan untuk mendulang simpati dari masyarakat. Melihat NU sebagai ormas potensial untuk segala kepentingannya, akhirnya Fuad pun mengambil alih pucuk pimpinan PCNU Bangkalan yang sebelumnya diketuai oleh Imam Bukhori Kholil, pesaingnya, - yang kemudian dia alihkan kepada Fahrillah, yang kapasitasnya sebagai orang dekat sekaligus familinya.

[32] Mutmainnah, *Kiai dan Dinamika Politik Lokal di Kabupaten Bangkalan dan Sumenep, Madura*, dalam Jamil Gunawan, Sutoro Eko Yunanto, Anton Birowo, dan Bambang Purwanto, ed., *Desentralisasi Globalisasi dan Demokrasi Lokal* (Jakarta: LP3ES, 2004), h. 227.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahkan jauh-jauh hari sebelum Fuad Amin berkuasa, NU dan Bassra merupakan dua organisasi masyarakat yang memang dalam realitanya banyak didominasi oleh trah bani kholil. Pada periode 2001-2005, Ketua Syuriah NU Bangkalan dijabat oleh KH. Abdullah Sachal dan Ketua Tanfidziyah NUBangkalan dijabat oleh Syafii Rofii. Sedang Ketua PCNU Bangkalan sendiri dijabat oleh KH. Imam Bukhori Kholil. Adapun Bassra Bangkalan juga pernah di bawah koordinator KH. Kholil A.G sebelum akhirnya beliau meninggal dunia pada tahun 1995. Basra memiliki dua LSM , pertama LSM Madura Mandiri dan kedua, LSM GMH (Gerakan Madura Hijau). Kedua LSM ini masing-masing dipimpin dan dibina oleh KH. Mundzir Rofii dan KH. Imam Bukhori Kholil.[33]

Gambaran singkat tentang sejarah NU dan Basra yang memang sudah semenjak dari dulu sudah didominasi oleh bani kholil setidaknya memberikan penjelasan bahwa keeksistensian Fuad pada dua ormas tersebut terbilang tidak mengejutkan, sebab Fuad sendiri merupakan orang tertua di antara pihak keluarga.

Sehingga kesanggupannya untuk menguasai dan menginfiltrasi kepentingan pribadinya ke dalam kedua ormas bukan merupakan hal yang sulit. Bahkan banom-banom NU di Bangkalan pun tidak terlepas dari jeratan dominasi FuadAmin. Banom NU yang tidak menjadi prioritas Fuad dalam kendalinya hanya IPNU dan IPPNU. Di luar itu, seluruh banom NU yang berada di struktur lebih atas dari pada IPNU dan IPPNU terhitung menjadi

[33] *Ibid.*, 268.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ladang pengendalian Fuad Amin.

Ormas NU menjadi basis kekuatan Fuad Amin karena banyak di antara para keluarganya yang menduduki posisi-posisi strategis.182 Selain PCNU Bangkalan yang kini diketuai oleh KH. Fahrillah Ashori, seorang pimpinan Pondok Syaikhona Kholil yang sekaligus keponakannya sendiri dan merupakan putra dari KH. Abdullah Sachal, ada juga beberapa banom NU lainnya yang juga diduduki oleh para kroni dan keluarganya. Antara lain: Ketua anshor yang pernah dijabat oleh Maksum Yani, Abdul Kadir Rofii, Mustahal Rasyid, dan saat ini dijabat oleh Haji Hasani Zubair, yang kesemuanya merupakan bagian dari salah satu keluarga dan kroni Fuad Amin.[34] Sedang Muslimat NU dipegang oleh saudaranya KH. Fahrillah Ashori sendiri.

> "Kalau PCNU-nya dulu dua periode dipegang oleh Imam Bukhori, ini yang kontra dengan fuad. Keluar dari Imam ini ke Fahrillah, Fahrillah ini yang orang dia (keponakannya), sama dengan Imam juga keponakannya, Cuma yang satu ini relatif tidak punya kemampuan untuk mimpin sebuah organisasi-organisasi besar di Bangkalan. Jadi, dan dia ternyata ditaruh oleh Fuad. Kalau Muslimatnya saudaranya Fahri, Fuad juga yang milih. Pokoknya kalau yang levelnya Ansor pun ya, ini masih Fuad yang main kendali. Kalau sekelas IPNU, IPPNU ini sudah bisa dijamah oleh siapapun. Kalau Ansor ke atas, Ansor levelnya fatayat, kemudian ya NU-nya ini udah itu Fuad punya kontrol."[35]

Adapun sikap Muhammadiyah terhadap kepemimpinan Fuad Amin terkesan pasif. Sekalipun ada letupan-letupan yang dimunculkan oleh Haji Yasin Marseli selaku ketua Muhammadiyah Bangkalan, itu pun hanya

[34] Hasil Wawancara dengan Mathur Khusairi pada tanggal 05 Maret 2018.

[35] Hasil Wawancara dengan Mathur Khusairi pada tanggal 05 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekadar perkara yang sifatnya lebih privasi. Karena Fuad mencaplok tanahnya untuk keperluan pembuatan jalan kembar ke arah makam.[185]

> "Gak, enggak ada yang berani mas. Haji Yasin ini dulukan dia bisnis, dia kan kontraktor developer gitu, selama itu sama-sama menguntungkan dia gak akan berontak. Tapi ketika sudah aset pribadi diambil, nah baru dia berontak itu. Kalau dulu aman-aman aja, ketika bisnis sama-sama bisa jalan, is oke. Tapi kalau tanahnya yang dicaplok kemudian dibuat jalan umum ini, ya dia ngamuk benar itu. Dia ngelawan benar, tapi gak pakai kekuatan Muhammadiyahnya dia. Pribadi."[186]

C. Hasil (Kekuasaan Ekonomi)

Fuad Amin merupakan anggota DPR RI 1999-2004. Tapi pada 2003, ia dipilih anggota DPRD Bangkalan menjadi Bupati Bangkalan 2003-2008. Fuad kembali menjadi Bupati Bangkalan periode kedua hingga 2013.

Setelah itu, ia menjadi Ketua DPC Partai Gerindra yang mengantarnya menjadi Ketua DPRD Bangkalan sampai 2019. Tapi pada Desember 2014, KPK menangkap Fuad atas kejahatan korupsi yang dilakukannya.

Tabel di bawah ini merupakan rincian dari ratusan harta Fuad yang dirampas untuk negara sebagaimana dikutip dari putusan MA:

Tabel 3.1: Tanah dan Bangunan

NO.	ITEM	LUAS M^2	LOKASI
1	Sebidang tanah	11.755	Kelurahan Mlajah
2	Sebidang tanah dan bangunan	930	Desa Pemecutan Klod Kecamatan Denpasar Barat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3	Tanah dan bangunan		Kompleks Perumahan Graha Famili Kelurahan Pradah Kali Kendal, Dukuh Pakis, Kota Surabaya
4	Tanah dan bangunan		Wiyung Permai Barat IV, Blok A-II / 57
5	Tanah dan bangunan		Kel. Sambikerep, Kecamatan Lakarsantri Blok B-2
6	Tanah		Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Manyar-Sabrangan, Kota Surabaya
7	Tanah dan bangunan		Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan Madura
8	Sebidang tanah		Perumahan Casa Grande Kav. 354 Kelurahan Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, Yogyakarta
9	Sebidang tanah	10.165	Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan
10	Tanah dan bangunan		Kav. AAL-078, Cluster Villa Bukit Indah, Kabupaten Bangkalan
11	Sebidang tanah dan bangunan	tanah 2345 m2	jalan Cipinang Cempedak II Nomor 25A RT 011/06, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur
12	Sebidang tanah	3.582	Desa Sukolilo Barat, Kecamatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			Labang, Kabupaten Bangkalan
13	Sebidang tanah	1.038	Desa Petapan, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan
14	Sebidang tanah	18.466	Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan
15	Sebidang tanah dan bangunan	luas tanah 68	Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat
16	Sebidang tanah dan bangunan	luas tanah 794	Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jaksel
17	Sebidang tanah	201	Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara
18	Sebidang tanah	112	Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jaktim
19	Sebidang tanah	49	Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jaktim
20	Sebidang tanah	115	Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jaktim
21	Sebidang tanah	177	Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat
23	Sebidang tanah	400	Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati
24	Sebidang tanah	1216	Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati
25	Sebidang tanah	1249	Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			Jati
26	Sebidang tanah	19	Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati
27	Sebidang tanah	983	Keluarahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati
28	Sebidang tanah dan bangunan	tanah 288	Desa/Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan
29	Sebidang tanah dan bangunan	Tanah286	Desa / Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan
30	Sebidang tanah	947	Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Bangkalan
31	No 41		Satu unit bangunan Rumah berikut tanahnya yang terletak di Komplek Perumahan Graha Famili Tipe Akasia Kav.W-007 Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya
32	Sebidang tanah	5702	Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan
33	Sebidang tanah	503	Desa Burneh, Kecamatan Burneh, KabupatenBangkalan
34	Sebidang tanah	1738	Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan
35	Sebidang tanah	2764	Desa Burneh, Kecamatan Burneh,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			Kabupaten Bangkalan
36	Sebidang tanah	2693	Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan
37	Sebidang tanah	2614	Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan
38	Sebidang tanah	1259	Desa Bilaporah, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan
39	Sebidang tanah	3010	Desa Bilaporah, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalann
40	Sebidang tanah	5333	Desa Bilaporah, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan
41	Sebidang tanah	2269	Desa Ba'Engas, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan
42	Sebidang tanah	2978	Desa Ba'Engas, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan
43	Sebidang tanah	2095	Desa Ba'Engas, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan
44	Sebidang tanah	1539	Desa Ba'Engas, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan
45	Sebidang tanah	3245	Desa Ba'Engas, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan
46	Sebidang tanah	1663	Desa Petapan, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

47	Sebidang tanah	1725	Desa Petapan, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan
48	Sebidang tanah	15.740	Desa Mlajah, KecamatanBangkalan, Kabupaten Bangkalan
49	Sebidang tanah	10.000	Desa Mlajah, KecamatanBangkalan, Kabupaten Bangkalan
50	Sebidang tanah	190	Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan,Kabupaten Bangkalan
51	Sebidang tanah	664	Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan
52	Sebidang tanah	2472	Desa/Kelurahan Pangpong, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan
53	Sebidang tanah	1875	Desa/Kelurahan Petapan, Kecamatan Labang, Bangkalan
54	Sebidang tanah	8.480	Desa Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan
55	Sebidang tanah	1566	Desa Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan
56	Sebidang tanah	748	Desa Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan
57	Sebidang tanah	7251	Desa/Kelurahan Petapan,Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan
58	Sebidang tanah	1704	Desa / Kelurahan Petapan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			KecamatanLabang, Kabupaten Bangkalan
59	Sebidang tanah	3057	Desa / Kelurahan Petapan, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan
60	Sebidang tanah	739	Desa / Kelurahan Petapan, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan
61	Sebidang tanah	3764	Desa/Kelurahan Petapan, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan
62	Sebidang tanah	1652	Desa / Kelurahan Petapan, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan
63	Sebidang tanah	6059	Desa / Kelurahan Petapan, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan
64	Sebidang tanah	46	Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya
65	Sebidang tanah	399	Perumahan Kubu Pratama Indah Jalan Imam Bonjol Desa Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar
66	Sebidang tanah	430	Perumahan Kubu Pratama Indah Jalan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			Imam Bonjol Desa Pemecutan Klod, Denpasar
67	Sebidang tanah	56	Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan DukuhPakis, Kota Surabaya
68	Sebidang tanah	5892	Desa / Kelurahan Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan
69	Sebidang tanah	14.170	Kelurahan Mlajah,Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan
70	Sebidang tanah	1.088	Desa Sembilangan, Kecamatan Bangkalan
71	Sebidang tanah	548	Desa Mertajasah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan

Tabel 3.2: Elektronik

NO.	ITEM	UNIT	UKURAN	STATUS
1	Air Conditioner	41	1⁄2 PK	
2	televisi	37		
3	televisi	40		
4	LCD	1		
5	springbed	40	double bed	
6	big land	39		

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7	tempat tidur kayu	1	double bed berwarna coklat tua	
8	tandon kapasitas	4	1.500 liter	berfungsi baik
9	pemanas Air (Water Heater)	1		berfungsi dengan baik
10	printer	1		
11	filling cabinet.	1		
12	CCTV	1 SET		

Tabel 3.3: Properti

NO.	ITEM	UNIT	LOKASI
1	apartemen	1	Apartemen Sudirman Park, Tower Bougenville, lantai 32 Unit CC di Jalan KH Mas Mansyur, Jakpus
2	apartemen	1	Apartemen Sudirman Park, Tower Amarilis Lantai 31, Nomor Unit CF di Jalan KH Mas Mansyur Kav. 35 Jakpus
3	bangunan Rumah Susun	1	Sudirman Park Tower Bougenville Lantai 21 Unit BJ terletak di Jalan KH. Mas Mansyur Kav. 35 Jakpus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4	Apartemen/ Rumah Susun	1	bangunan No.tower B, Lantai 03, No.Unit 01, yang terletak di Waterplace Residence, Pakuwon Indah Surabaya
5	Apartemen/ Rumah Susun	1	bangunan No.tower B, Lantai 03, No.Unit 07, yang terletak di Waterplace Residence, Pakuwon Indah Surabaya
6	Apartemen/ Rumah Susun	1	bangunan No. Tower E, Lantai 12, No.Unit 02, yang terletak di Grande Waterplace Residence, Pakuwon Indah Surabaya
7	Rumah Susun	1	Mediterania Garden Residences 2 Tower Gardena Lantai 03 Unit GA terletak di Jalan Tanjung Duren Raya, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat
8	Rumah Susun	1	Mediterania Garden Residences 2 Jakarta Barat
9	Rumah Susun	1	Mediterania Garden Residences 2 Tower Helliconia Lantai 31 Unit HM yang terletak di Jalan Tanjung Duren Raya, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10	Rumah Susun	1	Mediterania Garden Residences 1 Tower Dahlia Lantai 17 Unit H/F yang terletak di Jalan Tanjung Duren
11	apartemen	1	Tower Jasmine Lantai 21 Unit JE, Mediterania Garden Residences
12	Rumah Susun	1	Condominium Regency Unit 1804, Surabaya
13	Rumah Susun / Apartemen	1	Waterplace Residence di Jalan Pakuwon Indah Surabaya
14	Apartemen atau Rumah Susun	1	di lantai 32 Blok Nomor BE Denpasar Residence, Kuningan City, Jaksel
15	Apartemen atau Rumah Susun	1	Sahid Sudirman Residence, lantai 36, Unit Z, Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Pusat
16	Apartemen/Rumah Susun	2	Ciputra World VIA dengan Nomor Unit 1203 dan 1205, Apartemen Ciputra World, JakseL

Tabel 3.4: Kendaraan

NO.	ITEM	UNIT
1	Mobil Toyota Alphard	1
2	Mobil Toyota Camry	1
3	Mobil Suzuki Swift	1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4	Mobil Toyota Kijang Innova berwarna abu-abu metalik	1
5	Motor Kawasaki Ninja	1
6	Honda Mobilio	1
7	Mobil merk Honda ODYSSEY	1
8	Hyundai H1	1
9	Touota Lancer	1
10	Alphard	1
11	Toyota Innova	1
12	Toyota Type Innova V XS43	1
13	Honda Civic	1
14	Avanza Veloz	1
15	Toyota NA	1

Tabel 3.1: Surat Berharga

NO.	ITEM	UNIT
1	8,6 juta	Reksa Dana
2	5 ribu	Sukuk Negara Ritel Seri SR006

Selain itu, ada juga uang cash dan uang cash dari rekening yang diblokir yang juga dirampas untuk negara sebesar Rp. 213.048.000.000,-.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

HASIL PENELITIAN

Banyak pertanyaan dan juga analisis yang dikembangkan oleh berbagai pihak terkait dengan kiprah kiai pesantren di dalam politik.Namun demikian, setidaknya terdapat beberapa latar belakang mengapa kiai pesantren terlibat di dalam politik.*Pertama,* alasan teologis. Para kiai pesantren adalah figur yang lekat dengan penguasaan terhadap khazanah ilmu-ilmu keislaman yang bercorak sunni. Dalam perspektif ini, hubungan antara agama (*din*) dengan politik (*siasah*) dalam tradisi sunni pada dasarnya bersifat *ambigous* atau anbivalen. Mayoritas ulama sunni sering mengemukakan bahwa pada dasarnya di dalam Islam tidak ada pemisahan secara tegas antara agama (*din*) dengan politik (*siasah*). Dalam kerangka ini, politik dipandang sebagai bagian integral dari agama dan, karena itu, tidak perlu dijauhi, sebaliknya bahkan perlu untuk dimasuki, karena ia merupakan bagian dari pada *din* itu sendiri. Karena alasan inilah para kiai pesantren kemudian masuk ke kancah politik praktis.[1]

Kerangka teologis semacam ini merupakan sebuah cara pandang yang melihat agama Islam sebagai agama yang sempurna dan menyeluruh. Nazih Ayubi mendeskripsikan bahwasanya keyakinan teologis semacam ini sebagai sebuah pemahaman yang bersifat totalitas yang padu.Dengan kerangka teologis semacam ini, Islam diyakini menawarkan pemecahan terhadap semua masaah kehidupan.Dengan demikian Islam harus diterima dalam keseluruhannya yang

[1] Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam: dari Fundamentalisme, Modernisme, hingga Post- Modernisme,* (Jakarta: Paramadina, 1996), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus diterapkan dalam seluruh dimensi kehidupan, mulai dari keluarga, masyarakat desa, negara, dalam bidang sosial, ekonomi, budaya maupun politik. Realisasi sebuah masyarakat Islam dibayangkan dalam penciptaan sebuah negara Islam: yakni sebuah negara ideologis yang didasaran kepada ajaran-ajaran yang lengkap.[2]

Tetapi jiak mencermati kerangka teoretis dan dinamika sejarah, relasi agama dan politik memang multi wajah dan multi interpretatif bahan dalam perjalanan diskursus intelektual dan sejarah pemikiran serta praktek politik Islam, ada banyak pendapat yang berbeda, bahkan bertentangan secara diamentral.

Model teoretis politik Islam yang pertama merefleksikan adanya kecenderungan untuk menekankan aspek legal dan formal idealisme politik Islam.Kecenderungan semacam ini biasanya ditandai oleh keinginan syariah secara langsung sebagai konstitusi negara.Model formal ini memiliki potensi untuk berbenturan dengan sistem politik modern.

Sementara modal teoretis kedua lebih menekankan kepada subtansi dari pada kepada bentuk negara yang legal formal.Mereka yang berada dalam aliran ini berpandangan bahwa implementasi nilai-nilai ajaran Islam secara subtansial jauh lebih penting daripada formalitas yang kering.

Kedua, alasan dakwah.Dakwah merupakan usaha sosialisasi terhadap nilai-nilai keislaman kepada masyarakat.Sebagai usaha untuk menyebarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran Islam, banyak metode yang dapat ditempuh salah satunya adalah lewat jalur politik. Banyak kiai yang menempuh jalur ini

[2]Achmad Patoni, *Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berasumsi bahwa dengan masuk ke dalam kancah politik, maka medan dakwah yang dijalankannya menjadi kian luas, terbuka dan dapat berjalan secara efektif.

Ketiga, faktor jaring-jaring poitik yang sulit dihindari sehingga menjadikan kiai pesantren mau tidak mau tercebur ke dalamnya.[3]

Sebagai sebuah pilihan sikap, keterlibatan kiai pesantren di dalam politik di era reformasi ini termanifestasi dalam beberapa bentuk, antara lain, dalam bentuk terlibat secara langsung dengan menandai aktor politik, memberi restu atau mendukung terhadap kekuatan politik tertetu, dan menajdi bagian dari tim sukses sebuah kekuatan politik tertentu.

Terlepas apapun pilihan sikap dari keterlibatan seorang kiai pesantren di dalam politik, sikap tersebut telah menimbulkan perdebatan di berbagai kalangan.Bagi kalangan yang sependapat dengan sikap politik kiai pesantren tentu saja tidak melihat adanya sesuatu yang salah dari sikap yang di ambil kiai.Justru sikap tersebut dianggap sebuah pilihan politik yang strategis.Namun demikian, tidak sedikit pula yang bersikap kontra.Mereka yang menentang ini melihat bahwa selayaknya sikap kiai pesanten adalah sikap netral.Kiai pesantren seharusnya memposisikan diri sebagai figur netral yang tidak memihak kepada suatu kekuatan politik tertentu.Ketika kiai pesantren sudah memihak kepada suatu sikap politik tertentu, dampaknya sangat luas.Selain menjadi tidak netral, umat juga menjadi terfragmentasi.

Selain itu, otoritas kiai ternyata juga memiliki keterbatasan legitimasi. Paling tidak, ia mempunyai batasan-batasan yang menentukan wilayah atau situasi bagi

[3]*Ibid.,* 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keberlakuannya. Batasan-batasan ini bersifat normatif dan dinyatakan secara longgar dalam konsep “berjuang demi Islam”.Konsep ini dapat digunakan oleh pengikut kiai manapun atau kelompok di dalam masyarakat untuk menilai terhadap keberadaan dan kiprah seorang kiai.Sebagai pemegang otoritas keagamaan, kiai didudukkan oleh masyarakat pada posisi yang terhormat.Posisi ini memiliki implikasi yang cukup luas, di mana dengan kehoratan yang melekat dalam dirinya, seorang kiai mampu memengaruhi dan menggerakkan aksi atau tanggapan emosional para pengikutnya.[4]

A. Respon Politik Pemuda di Bangkalan

Keterlibatan sebagian kiai, tokoh pesantren dan para mantan santri dalam partai politik juga tidak menutup kemungkinan terjadi persaingan politik antara kiai dan santri yang secara kebetulan berada pada kelompok politik berbeda. Paling tidak, perbedaan afiliasi dan sepak-terjang politik kiai dan tokoh pesantren telah menimbulkan beragam apresiasi, baik dalam respon yang apresiatif, sinis, atau sekedar pasif. Keterlibatan kiai dalam satu kepentingan politik, termasuk dukungan terhadap calon tertentu dalam pemilihan umum, kepala negara ataupun kepala daerah bukan referensi umum kalangan santri.Kalaupun masih ada sebagian yang masih menempatkan kiai sebagai acuan dalam mengambil keputusan atau sikap politik, dapat dipastikan hal itu menuntut kondisi-kondisi tertentu.

[4]*Ibid.*, 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam rangka memainkan peran dalam masyarakat seorang santri tidak harus menjadi pemimpin atau merasa tidak bisa memainkan peran apabila tidak menjadi pemimpin.Peran sosial bisa dilakukan dalam posisi di manapun seorang santri berada. Apabila keadaannya memang mengharuskan untuk berada di belakang maka dia harus bisa menerima kepemimpinan orang lain, akan tetapi apabila keadaannya mengharuskannya menjadi pemimpin maka dia harus berani mengambil posisi kepemimpinan dan memandangnya sebagau tugas dari Allah serta memainkan perannya sebagai khalifah Allah di bumi-Nya.

Untuk mencapai kondisi ideal seorang santri seperti disebutkan di atas dibutuhkan suatu upaya tak kenal lelah dari masing-masing individu sehingga bisa dihasilkan seorang santri yang bisa menjawab tantangan yang mungkin muncul di masyarakatnya.Usaha ini sebenarnya dapat dilakukan dengan mudah dalam sistem pendidikan pesantren yang integral.Karena sebenarnya kehidupan pesantren memang ditujukan untuk mendidik santri yang bisa menjawab segala tantangan di masyarakatnya.

Relasi kiai, santri dan politik memang mengalami perubahan, sekurang-kurangnya terdapat kesadaran di dalam kerangka referensi yang menempatkan kiai dalam tataran fungsi khusus. Memang semakin rasional sebuah masyarakat akan semakin menempatkan dirinya di dalam *mindset* diferensiasi struktur spesialisasi fungsi.

Penempatan kiai pun telah menggunakan logika seperti itu.Kiai dengan fungsi utamanya adalah sebagai guru spiritual dan pembimbing umat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di dalam kehidupan keagamaan maka posisi kiai juga ditempatkan disitu.Jika kiai kemudian memasuki kawasan dunia politik, maka posisi utama kiai pun berubah ke arah tersebut.

Jika menggunakan konsepsi pusat-pinggiran, maka perubahan posisi tersebut akan menempatkan perubahan posisi kiai dari posisi pusat ─ sebagai guru spiritual ─ ke arah pinggiran yang disebabkan posisi pusat ditempati *posisioning*nyasebagai politisi. Jika kemudian terdapat perubahan kepatuhan ketika seorang kiai berubah posisinya tersebut. Dalam hal ini, maka posisi kiai akan tetap ditaati ketika kiai dimaksud berada di dalam posisi pusat sebagai guru spiritual dan kurang atau bahkan tidak ditaati ketika posisi tersebut berubah menjadi pinggiran. Kiai memasuki dunia politik berarti telah meminggirkan posisinya dalam kawasan keagamaan dan kemudian posisi sentralnya digantikan oleh dunia politik.

Jika seorang kiai kembali menempatkan dunia guru spiritual sebagai pusat setelah sekian lama meminggirkannya, maka ada dua kemungkinan yaitu bisa diterima kembali oleh masyarakat dalam posisinya tersebut dan bisa juga ditolak.Semuanya tergantung pada bagaimana kiai posisioning kiai pada saat yang bersangkutan menapaki dunia politik yang oleh masyarakat sangat profane.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Hegemoni Politik Kaum Sarungan Di Bangkalan

Paling tidak ada tiga alasan mengapa ulama sebagian pemuka (elit) agama terlibat dalam persoalan politik.[5]*Pertama,* bisa ditelusuri dari sumber ajaran agama Islam sendiri yang memiliki lingkup tidak hanya pada aspek ritual dan bimbingan moral tetapi juga pada ilai-nilai disemua sisi kehidupan baik dalam ilmu pengetahuan, ekonomi, hukum, sosial, maupun persoalan politik. Sekalipun ajaran Islam lewat kitab sucinya memberikan tuntunan yang bersifat garis besar tetapi tidak sedikit ajaran yang memberikan pesan-pesan mengenai kehidupan bersama, termasuk tentang negara.Demikian pula di dalam sumber ajaran Islam yang kedua yaitu hadits, selain pembawa risalah, Rasulullah SAW., juga sosok negarawan sehubungan dengan posisinya sebagai kepala negara.

Kedua, dilihat dari sisi sejarahnya, keterlibatan ulama dalam politik telah terlihat sejak dalam berdemokrasi bangsa ini tidak saja dapat dilihat pada masa perlawanan fisik mengusir penjajah, melainkan juga dalam kegiatan yang berbentuk diplomasi, baik ketika menjelang maupun setelah kemerdekaan diploklamirkan.Peran para ulama lebih nampak pada saat sejumlah pesantren ditempatkan sebagai pusat pengatur strategi melawan penjajah, banyak para ulama yang memberi dukungan moral, ekonomi maupun politik.[6]

---

[5] Imam Suprayogo, *Kiai Politik, Kiai Advokad,dan Kiai Spiritual,* Disertasi tidak dipublikasikan (Surabaya: Universitas Airlangga, 1998), 54.

[6] Karel Steenbrink, *PesantrenMadrasah Sekolah,* (Jakarta: LP3ES, 1994), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapat bahwa peran politik ulama terbentuk oleh faktor sejarah juga diakui oleh M. Dawam Rahadjo.[7]Ia menjelaskan pada zaman kerajaan Islam di Jawa secara tidak resmi diadakan pemisahan antara urusan negara yang dipegang oleh para sultan dan urusan agama yang dipegang oleh para ulama. Pemisahan ini justru semakin memperkokoh posisi ulama karena banyak masalah sosial kemasyarakatan yangmerupakan bagian dari keberagaman rakyat yang harus ditangani oleh ulama.Akibatnya dalam sejarah perjuangan bangsa, ulama dapat dipahami sebagai pusat kekuatan sosial politik yang perannya tidak bisa diabaikan begitu saja.

Ketiga, posisi ulama sebagai elit agama yang bisa memobilisasi massa dan mempunyai pengaruh besar dikalangan masyarakat, menjadikan mereka terlibat dalam persoalan pengambilan keputusan bersama, kepemimpinan, serta menyelesaikan persoalan-persoalan sosial, pengembangna pendidikan, dan kemasyarakatan. Ulama dalam menyiarkan dakwah dan misinya membutuhkan pengaruh dari penguasa. Dakwah akan lebih mudah dan berhasil karena didukung dan mendapat izin legitimasi dari pihak pejabat yang memegang kekuasaan.

Dalam sosiologi, kata elit lazim didefinisikan sebagai anggota suatu kelompok kecil dalam masyarakat yang tergolong disegani, dihormati, kaya, serta berkuasa, strata, memiliki kemampuan mengendalikan aktifitas perekonomian dan sangat dominan mempengaruhi proses pengambilan

[7] Imam Suprayogo, *op. cit.*, 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keputusan-keputusan penting.[8]Itulah sebabnya, mudah dimengerti apabila dalam banyak hal kelompok elit tidak hanya ditempatkan sebagai pemberi legitimasi, tetapi lebih dari itu mereka adalah panutan sikap dan acuan tindakan, serta senantiasa diharapkan dapat berbuat nyata bagi kepentingan bersama.

Kehadiran reformasi mendorong para kiai untuk tampil ke publik. Para kiai yang *notabene* memiliki pengaruh kuat dalam masyarakat,merasa berkewajiban menata dan memperbaiki tatanan bangsa yang sedang terpuruk saat itu. Peran baru ini menjadi awal kembalinya kiai di panggung politik nasional, setelah sekian lama berdiam diri untuk tidak berpolitik praktis akibat kekecewaan politik di masa orde baru.Bahkan keberadaan partai barunya memperkuat syahwat politik para kiai.Terbukti pasca reformasi banyak kiai menentukan sikapnya berpolitik praktis dengan berafiliasi kepada partai politik tertentu, tidak hanya kiai nasional tetapi juga kai lokal.

Apalagi setelah munculnya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.Para kiai sibuk mencalonkan dan dicalonkan sebagai bupati, sehingga para kiai dituntut melakukan transaksi politik demi kepentingan suksesinya.Ramainya suksesi dalam momen pilkada yang melibatkan aktor kiai seolah menjadi “budaya” dalam perpolitikan lokal.Kiai menjadi pusat afiliasi untuk memenangkan suksesi.

Kenyataan ini terapresiasi dalam drama pemilihan kepala daerah di Jawa Timur— dalam hal ini di Bangkalan — sepanjang tahun 2005 yang

[8] Nurul Azizah, *op. cit.*, 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lalu.Drama pemilihan itu mampu menarik simpati para kiai untuk ikut serta meramaikan pemilihan, tidak hanya dengan melakukan kampanye untuk memenangkan suksesi, tetapi juga melakukan permainan politikuntuk mencapai tujuan melalui transaksi politik.

Transaksi politik atau dikenal dengan interaksi tawar-menawar, pada awalnya merupakan permainan politik yang sering kali digunakan elit birokrat untuk kepentingan politik. Dalam pilkada permainan ini telah merambah kepada kelompok elit lain seperti kiai, untuk digunakan sebagai sarana dalam memenangkan suksesi.

Karena itu, permainan politik semacam ini terekspresi dalam bentuk interaksi tawar-menawar (secara sosiologis) atau *bargaining* (secara politik) antar elit.Elit masyarakat (kiai) melakukan interaksi tawar-menawar dengan elit birokrat (penguasa, calon), elit birokrat melakukan interaksi tawar-menawar dengan elit pengusaha (para bisnismen, pedagang, dan lain sebagainya), begitu juga sebaliknya.Semuanya saling berinteraksi dalam rangka membuat satu komintmen demi mencapai kesepakatan politik.

Transaksi yang dilakukan kiai berbentuk negosiasi untuk mencapai kesepakatan bersama melalui tahapan tertentu.Tahapan yang kita kenal berupa tawaran yang berbentuk silaturrahim dari calon pilkada.Kunjungan itu sebuah aksi yang memiliki makna mengharap kiai bisa ikut bergabung dengan calon yang mengunjunginya.Kunjungan silaturrahim itu disebut dengan tahapan *prebar gaining* yaitu sebuah tahapan sebelum transaksi berlangsung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pilkada, transaksi politik kiai dilakukan secara terbuka karena pilkada dianggap sebagai pemilihan netral yang tidak melibatkan ideologi, karena itu para kiai secara bebas melakukan transaksi sesuai dengan inspirasi yang muncul dalam dirinya. Uniknya, kiai menempatkan nilai-nilai religi sebagai faktor paling penting, sehingga kiai seolah lebih pasif dibanding calon dalam melakukan transaksi. Namun demikian, nilai-nilai religi dan kapasitas yang dimiliki kiai mampu mnempatkan dirinya sebagai kelompok paling dibutuhkan, sebab kiai mampu memegang otoritas kepemimpinan yang memiliki akses kuat mempengaruhi dan menggerakkan massa. Dalam pilkada, massa adalah kuantitas suara yang sangat diperlukan.

Secara teoritik, transaksi yang dilakukan kiai sebenarnya dilandasi prinsip transaksi ekonomi yang bersifat elementer.Kiai menyediakan barang atau jasa dan berharap memperoleh imbalan atau *reward*yang diinginkan.Transaksi kiai tidak hanya diukur dengan nilai uang, tetapi juga diukur dengan sesuatu yang tidak nyata, semisal, perbaikan kondisi daerah ke depan. Transaksi politik kiai juga memiliki prinsip yang sama dengan pertukaran sosial, di mana kiai memiliki daya tarik terhadap satu sama lainserta keinginannya untuk mendapatkan jenis imbalan (ganjaran), baik yang bersifat intrinsik maupun ekstrinsik. Dalam hal ini, transaksi politik kiai tetap berorientasi pada tujuan yang hanya diperoleh melalui transaksi dengan orang lain.

Penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa transaksi politik kiai merupakan implikasi dari undang-undang no. 32 tahun 2004 tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintahan daerah.Undang-undang itu memiliki makna memberikan apresiasi kepada kelompok elit lokal seperti kiai untuk menentukan siapa yang pantas menjadi ratu (pemimpin) di daerah. Karena itu, kedudukan kiai sebagai pemilik otoritas menjadi penting dalam pilkada, sebab kemampuannya menggerakkan massa menjadi daya tawar yang dapat digunakan sebagai sarana kepentingan rakyat. Kiai dalam pilkada memiliki tugas mengarahkan masyarakat menentukan pilihan politiknya sesuai dengan inspirasi (hati nurani) dan aspirasi, agar tidak terjerumus pada pilihan pragmatis yang hanya mengandalkan uang sebagai tumbal kepentingan kekuasaan.

Terbentuknya dinasti politik di bawah kepemimpinan Fuad Amin bisa dilihat dari beragam faktor, *pertama* dimungkinkan karena alam reformasi tidak diimbangi oleh pranata hukum yang siap, baik dari segi yuridis maupun manusianya. Artinya suprastruktur dan infrastruktur hukum belum teguh, tegak, dan mapan.*Kedua*, civil society masih lemah, tidak terintegrasi dalam satu kekuatan dominan.*Ketiga*, karena Fuad Amin merupakan salah satu cicit Kiai Kholil Bangkalan yang merupakan ulama besar NU kharismatik yag banyak dijadikan rujukan ilmu keagamaan. Di tengah masyarakat religius, penghormatan khidmat kepada para kiai dan keturunannya merupakan sebuah tradisi lahiriah yang wajib, ditambah, agama merupakan faktor pemersatu identitas masyarakat Madura.[9]Penghormatan masyarakat Bangkalan terhadap Fuad Amin salah satunya bersumber dari faktor tersebut. Keempat, karena

[9]Mutmainnah, *Kiai dan Dinamika Politik Lokal di Kabupaten Bangkalan dan Sumenep, Madura*, (Jakarta: LP3ES, 2004), 216.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

posisi Fuad Amin sebagai *blater* (baca: jawara), yang memudahkan dirinya menghegemoni kekuatan-kekuatan sosial di Bangkalan. Menurut Abdur Rozaki, sebagaimana penulis kutip kangsung dari wawancaranya dengan majalah detik, ia mengatakan:

> "Kelihaian bermain di dua kelas basis masyarakat, blater dan pesantren, menurut Abdur, melanggengkan kekuasaan Fuad. Mayoritas kepala desa (klebun) di Bangkalan yang menjadi tangan kanan Fuad adalah blater itu.Supaya loyal para klebun itu disuruh membuat perusahaan lalu diberi proyek."[10]

1. Sumber Kekuasaan Fuad Amin

Sumber kekuasaan yang dimiliki oleh Fuad Amin, *pertama* adalah kemampuannya memonopoli instrumen-instrumen keagamaan, baik yang sifatnya materi dan imateri, yakni lewat institusi keagamaan maupun lewat reproduksi kharisma dari ketakdziman dan mitos-mitos kesaktian yang ia miliki. *Kedua*, monopoli kekerasan lewat dua jalur, baik formal maupun informal.Jalur formal adalah dalam kapasitasnya sebagai Bupati, sedang jalur informal adalah dalam kapasitasnya sebagai kiai-blater.Sedang sumber kekuasaan yang *ketiga*, yakni dalam statusnya sebagai oligarki lokal dengan basis kekayaan yang terbilang mapas serta melimpah jika diukur berdasarkan pertertorial wilayah Bangkalan.

Dalam kapasitasnya sebagai bagian dari trah dan keturunan kiai Kholil, kharisma yang terpancar pada diri Fuad Amin sebetulnya juga tidak terlepas dari budaya masyarakat setempat yang memegang teguh

[10]"Dinasti Tuhan Kedua di Bangkalan," *Majalah Detik*, edidi 161 (29 Desember 2014 – 4 Januari 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adat dan penghormatan mereka kepada kalangan kiai.Bukan hanya itu, bahkan sepak terjang kiai di masyarakat sekitar, juga selalu dianggap sebagai aktor yang memiliki banyak kelebihan mistis.Kiai sebagaimana telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, merupakan elit lokal yang banyak memberikan kontribusi bagi kehidupan masyarakat, bukan saja semenjak era reformasi bergulir, tetapi jauh dari ketika era kerajaan dan kolonialisme berlangsung.Dalam sejarahnya, kiai sering kali terlibat dalam gerakan-gerakan perlawanan terhadap elit, baik raja maupun pejabat-pejabat kolonial yang acapkali menyengsarakan rakyat dengan berbagai kewajiban membayar upeti dan kerja paksa.Bahkan di masa orde baru, perlawanan-perlawanan para kiai terhadap rezim masih terlihat jelas.Misalnya dalam perlawanan yang diinisiasi oleh para kiai yang tergabung dalam BASSRA. Selain itu, kiai merupakan satu-satunya simbol yang mampu mempererat jalinan kohesi sosial antar kelompok masyarakat lewat acara-acara ritual keagamaan.

Syaikhona Kholil, merupakan satu di antara kiai lainnya yang memiliki pengaruh besar di masanya. Dia merupakan elit lokal Bangkalan dengan banyak murid tersebar di seluruh pelosok Nusantara.Kiai Hasyim Asy'ari (pendiri NU) pernah berguru ilmu agama kepada beliau.Dengan tingkat keilmuan yang tinggi dalam bidang agama, seluruh masyarakat Bangkalan menaruh simpati dan takdzim yang mendalam terhadap kepribadian Syakhona Kholil.Juga kepada keturunan-keturunannya kelak, termasuk Fuad Amin yang kini mewarisi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

simbol-simbol penghormatan tersebut.Apalagi Fuad Amin merupakank eturunan tertua di antara keluarga bani Kholil yang lainnya.Kharisma yang dimiliki oleh Fuad Amin pada akhirnya menciptakan mitos-mitos tersendiri tentang kesaktian yang diintrodusir terhadap dirinya, apalagi Fuad Amin begitu luwes untuk bersosialisasi dengan kalangan blater.Kalangan blater yang identik dengan dunia carok dan kekerasan, faktanya telah meningkatkan pamor Fuad Amin di masyarakat.

Di samping itu, dengan posisi Fuad Amin yang mapan, maka tak sulit pula bagi dirinya untuk memelihara jaringan blater.Fuad Amin sadar, bahwa blater adalah kalangan yang mudah ditaklukkan dengan uang.Maka tak aneh jika kemudian di antara masyarakat Bangkalan, Fuad Amin dikenal dengan istilah kiai-blater.Karena di satu sisis dia besar di lingkungan kiai, sedang di sisis lain Fuad Amin hidup dengan kalangan blater.Dua rupa kekuatan yang direproduksi pada diri Fuad Amin sekaligus ini dalam perjalannya turut memudahkan dirinya untuk menjadi orang yang dihormati dalam tatanan kelas sosial di masyarakat.Dengan statusnya sebagai kiai, dia mendapatkan legitimasi masyarakat lewat pengakuan rasa takdzim dan mitos etik yang sifatnya transendental, sedang dengan statusnya sebagai blater, Fuad Amin mendapatkan legitimasi lewat monopoli kekerasan yang kerap Fuad praktekkan.Dengan karakteristik alam blater yang identik dengan tindakan-tindakan koersif tersebut, nyatanya telah mempolarisasikan internalisasi ketakutan menjadi semakin mewaba di segenap masyarakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bangkalan.Dua modal tersebut, ditambah posisi Fuad yang mapan, menjadi elemen penting bagi keberhasilan dirinya menduduki posisi jabatan struktural sebagai bupati Bangkalan.

Setelah dirinya berhasil menduduki jabatan formal dalam struktur pemerintahan, sumber kekuasaan Fuad Amin semakin bertambah.Dia bukan hanya mengakumulasikan sumber kekuasaannya dari macam-macam otoritas informalnya selaku kiai dan blater, tetapi juga otoritas legal-formalnya selaku bupati.Di masa kepemimpinannya sebagai bupati, Fuad Amin perlahan-lahan mulai membangun jaringannya, baik itu jaringan politik maupun jaringan sosial kemasyarakatan.Dalam jaringan politik, Fuad Amin menguasai elit-elit birokrat dan partai politik melalui cengkeramannya pada aparat kepala desa dan politisi-politisi lokal. Kondisi ini dapat dilihat dengan begitu jelas dari loyalitas yang ditunjukkan oleh para kepala desa dengan seringnya mereka membantu Fuad Amin dalam setiap proses seleksi politik di Bangkalan, dan banyaknya ketua partai politik yang berafiliasi dengan Fuad Amin.

Dalam organisasi sosial, Fuad Amin menguasai unsur-unsur ormas, terutama NU, MUI, dan BASSRA. Banyaknya para elit dan anggota ormas keagamaan yang menunjukkan loyalitas mereka kepada Fuad Amin timbul dari rasa solidaritas serta anggapan bahwa Fuad Amin merupakan kiai sepuh.Kiai sepuh, dan lebih lagi berasal dari trah bani Kholil, tentu menjadi sumber legitimasi utama dan terpenting bagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

personaliti Fuad untuk dapat disegani oleh kalangan kiai lainnya, terutama para kiai yang berasal dari non bani Kholil.

Kekuasaan yang dimiliki dominan yang Fuad Amin pegang telah memberikan ruang cukup bebas bagi dirinya untuk bertindak semau hati.Wewenang yang dimilikinya kerap dia gunakan untuk melakukan kontrol terhadap masyarakat sipil yang mencoba-coba untuk mengusik kepemimpinannya. Bahkan dengan otoritas yang tinggi, banyak sekali berbagai penyimpangan dan pelanggaran hukum yang dia lakukan.Penggunaan ijazah palsu, manipulasi perolehan suara dalam pemilihan, korupsi, dan berbagai tindakan kriminal lewat aksi kekerasan terhadap para penentangnya, menjadi gambaran lumrah selama peride eksistensi Fuad Amin dalam ruang lingkup politik Bangkalan.Sayangnya, berbagai pelanggaran hukum yang dia lakukan tidak pernah sedikitpun tersentuh oleh hukum. Maka dengan absennya sikap tegas dan profesionalitas dari para penegak hukum setempat, perilaku Fuad Amin semakin menjadi-jadi dalam melakukan penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Fuad Amin, telah mereproduksi mitos-mitos baru atau meneguhkan eksistensi Fuad Amin sebagai simbol orang kuat lokal yang memang tidak bisa dilawan oleh dan dalam bentuk apapun. Stigma seperti itu terus-menerus diproduksi oleh masyarakat, seperti bahwa tanpa memiliki ijazah sekalipun Fuad Amin masih bisa jadi bupati, atau Fuad Amin adalah wali karena keturunan kiai, dan lain sebagainya.

2. Networking atau Sistem Jaringan Kiai Fuad Amin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara garis besar, stratifikasi sosial kalangan kiai di Bangkalan ditempati oleh tiga kelompok utama.Pada urutan pertama diisi oleh para kiai pesantren yang berasal dari trah bani Kholil, urutan kedua diisi oleh pesantren non bani Kholil, dan urutan ketiga diisi oleh kiai kampung atau biasa disebut bindhereh.[11]

Penempatan kalangan Kiai yang berasal dari trah bani Kholil di urutan paling atas merupakan apresiasi yang diberikan oleh masyarakat kepada keluarga Bani Kholil.Hal ini ditujukan untuk menghormati segala jasa leluhur Kiai Kholil atas usahanya dalam mengajarkan ilmu agama dan segala ilmu lainnya di masyarakat.Makanya keluarga besar bani kholil adalah keluarga terpandang hingga saat ini. Segala upaya apapun yang berkaitan dengan dinamika kehidupan masyarakat, baik itu kegiatan sosial maupun politik, pasti akan melibatkan keluarga bani kholil di garda terdepan masyarakat.

Hal ini bukannya tanpa menimbulkan dampak negatif.Karena faktanya dominasi keluarga bani Kholil di Bangkalan sangat begitu besar.Sehingga benih-benih fanatisme terhadap keluarga bani kholil dengan sendirinya muncul di kalangan masyarakat.Fanatisme ini merupakan pangkal dari berbagai sikap apatis yang pada akhirnya ditunjukkan oleh masyarakat terhadap segala sesuatu yang bersinggungan dengan dimensi sosial dan politik yang ada di Bangkalan.Karena apapun

[11]Abdur Rozaki, *Islam, Demokrasi, dan Orang Kuat Lokal: Studi Kemunculan Oligarki Politik dan Perlawanan Sosial di Bangkalan Madura,* (Disertasi Program Studi Islam, UIN Sunan Kalijaga, 2015), 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berkaitan dengan kehidupan di Bangkalan, seolah-olah sudah menjadi kewajiban dan tanggungan bagi bani kholil seluruhnya.

Apatisme masyarakat Bangkalan yang terekam dala segala sesuatu yang berbau aspek sosial maupun politik, dengan menyerahkan segala urusan-urusan tersebut terhadap keluarga bani kholil, sebenarnya memiliki dampak signifikan pada kehidupan sosial politik mereka di Bangkalan.Semua itu merupakan dampak negatif yang pada akhirnya mesti dibebankan dan menjadi tanggungan bersama-sama.Pertama, karena anggapan dan rasa hormat masyarakat Bangkalan terhadap keluarga bani kholil terlalu berlebihan, sehingga apapun yang berkaitan dengan jabatan publik dan persoalan-persoalan yang ada mesti dilimpahkan kepada bani kholil seutuhnya.

Pelimpahan jabatan ketua di ormas, di partai, dan di segala dimensi kehidupan masyarakat yang lain. Semuanya seakan-akan mesti diberikan kepada keluarga bani kholil.Pasalnya citra keluarga bani kholil seolah-olah sanggup untuk menerima tanggung jawab tersebut.Karena adanya pelimpahan wewenang yang membabi buta tersebut sehingga timbul dampak lainnya, yakni hilangnya motivasi untuk memacu kapasitas dan integritas personal dari para keluarga bani kholil. Sehingga, anggapan bahwa tanpa memiliki kemampuan pun pasti akan dianggap oleh masyarakat, menjadi wabah bagi lahirnya benih superioritas diri yang melanda keluarga bani kholil. Yang dirugikan pun masyarakat, sebab keberadaan para tokoh masyarakat yang memiliki potensi untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengemban tanggung jawab tersebut kemudian tidak terangkat ke permukaan.[12]Makanya tak heran jika seluruh jabatan ormas, partai politik, danjabatan publik di Bangkalan banyak ditempati oleh keluarga bani kholil.

Bahkan penempatan keluarga Syaikhona Kholil bukan saja terjadi di internal pemerintahan atau ormas dan partai yang telah didominasi oleh Fuad Amin.Nyatanya, di bagian-bagian kelompok peyeimbang sekalipun, atau kelompok oposisi di luar jeratan Fuad Amin, hal tersebut masih tetap saja berlaku. misalnya pengangkatan Ahmad Ali Ridho sebagai ketua Forsis (Forum silaturrahmi Stake Holder Se-Kabupaten Bangkalan) oleh teman-teman aktivis, hal ini tidak terlepas dari figur kekiaiannya sebagai salah satu keturunan Syaikhona Kholil dan satu-satunya kiai di Bangkalan selain Imam Bukhori Kholil yang berani vokal terhadap keluarganya sendiri, Fuad Amin. Selain itu, sedikitnya jumlah kiai atau kalangan pesantren yang berani untuk melakukan konfrontasi dengan Fuad, merupakan alasan lain dari pengangkatan Ahmad Ali Ridho sebagai ketua Forsis.[13]Karena dialah satu-satunya orang dari internal keluarga bersama Imam Bukhori yang berani menentang dominasi Fuad.

Bukan hanya masyarakat biasa yang menaruh rasa takdzim kepada keluarga bani kholil, bahkan para kiai yang berasal dari non trah bani kholil yang ada di Bangkalan pun akan tunduk serta takdzim kepada

[12]Hasil Wawancara dengan Rofii, S.H. pada tanggal 29 Desember 2017.

[13]Hasil Wawancara dengan Rofii, S.H. pada tanggal 29 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka. Alasan inilah yang menjadikan kekuatan sosial dan politik Fuad Amin semakin menjadi-jadi.Karena selutuh lini kehidupan masyarakat Bangkalan mampu dia kuasai.Banyaknya famili yang menduduki posisi-posisi strategis, dan kondisi masyarakat yang menaruh simpati kepada keluarga bani kholil, termasuk para kiai yang berasal dari non bani kholil, dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh Fuad untuk mengekalkan kekuasaannya tersebut.

Jalinan hubungan kedekatan antara para kiai dengan Fuad tidak terbatas hanya di antara kelarga saja. Di luar keluarga pun, Fuad menjalin hubungan yang erat dengan para kiai lainnya. Di antara beberapa kiai yang memiliki hubungan spesial dengan Fuad Amin di luar keluarga bani kholil: Kiai Nurdin (Ketua Basra Bangkalan), Kiai Muhaimin (Pengasuh Pondok Pesantren As-Shamadiyah), dan Kiai Sarifuddin Damanhuri (Ketua MUI Bangkalan).[14]

Kalangan kiai faktanya tidak terbebas dari pemanfaatan yang dilakukan oleh Fuad kepada mereka.Pemanfaatan kalangan kiai oleh Fuad Amin terlihat dalam kasus keluarnya fatwa sesat pelatihan shalat khusyu' oleh MUI. Cerita ini berawal dari kegiatan pelatihan shalat khusyu' yang diadakan oleh Imam Bukhori ini bekerja sama dengan Ustadz Abu Sangkan selaku mentor dalam kegiatan tersebut. Ketika kegiatan pelatihan shalat khusyu' yang pertama kali diadakan berjalan dengan sukses, akhirnya Imam Bukhori berniat untuk kembali

[14]Hasil Wawancara dengan Rofii, S.H. pada tanggal 29 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyelenggarakan acara serupa dengan tempat di Masjid Agung.Mengingat antusias masyarakat untuk mengikuti kegiatan pelatihan shalat khusyu' ini sangat begitu besar.Kabar ini sampai juga kepada Fuad Amin. Mendengar bahwa yang mengadakan acara ini adalah Imam Bukhori, Fuad Amin bergegas mencari cara untuk menggagalkannya. Panitia kegiatan dipanggil dan dilakukan pembicaraan untuk tidak menghubung-hubungkan acara tersebut dengan nama Imam Bukhori. Agar klaim adanya kegiatan tersebut adalah murni dari bupati. Tapi cara ini gagal. Lalu dicarilah cara lain untuk menggagalkannya, akhirnya muncullah ide untuk mengumpulkan para kiai di Bangkalan dengan menyertakan MUI setempat untuk mencari celah adanya unsur kesesatan pada kegiatan tersebut. Dengan keluarnya fatwa sesat MUI Bangkalan mengenai pelatihan shalat khusyu' tersebut, otomatis ijin kegiatan dari pemda tidak keluar.Dan pemda melarang diadakannya kegiatan yang diinisiasi oleh Imam Bukhori bersama Ustadz Abu Sangkan itu.[15]

> "... Karena kemudian ini gak berhasi, maka beliau ngudang MUI dan kiai-kiai yang ada di Bangkalan, dicari apa yang kira-kira dalam pelatihan shalat khusyu ini yang kira-kira bisa dipelesetkan sebagai sesuatu yang sesat. Nah akhirnya kiai-kiai dengan difasilitasi MUI itu melakukan rapat dan menyatakan bahwa pelatihan yang dilaksanakan Ustadz Abu Sangkan ini adalah pelatihan yang mengandung unsur kesesatan dan menyesatkan. Dengan karena ada surat dari MUI itu kemudian pemda melarang kegiatan Ustadz Abu Sangkan itu. Padahal intinya bukan di pelatihan shaat khusyunya, bukan di penyesatannya, tapi lebih kepada karena ini faktor Fuad tadi."[16]

[15]Hasil Wawancara dengan Rofii, S.H. pada tanggal 29 Desember 2017.

[16]Hasil Wawancara dengan Rofii, S.H. pada tanggal 29 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Loyalitas kiai Bangkalan terhadap Fuad Amin bukan hanya lahir dari anggapan bahwa Fuad adalah cucu kiai besar yang patut dihormati, tetapi juga lahir dari rasa takut bila nantinya kalau ada intimidasi terhadap mereka.Intimidasi ini tidak mesti berupa ancaman fisik saja, karena dalam kenyataannya intimidasi ini pun dapat berupa pemboikotan rekomendasi oleh Fuad Amin terhadap program-program pemerintah yang diajukan oleh kiai, baik kepada pemerintah provinsi maupun pusat.

> "...ketika orang ini memerlukan rekomendasi ke bupati untuk terkucurnya dana itu, itu gak dikasih. Padahal secara lembaga dia butuh bantuan.Baik itu bantuan dari pemerintah provinsi, bantuan dari pemerintah pusat misalnya.Nah dari pada aku gak dukung Fuad nanti ini dipersulit. Jadi pengkondisian seperti itu yang dilakukan...."[17]

Disamping itu, pemanfaatan kalangan kiai oleh Fuad juga terlihat saat ada aksi-aksi dukungan terhadap dirinya. Pengerahan massa baik itu dari kalangan kepala desa maupun kalangan kiai tak lain agar seolah-olah pemerintahannya mendapat dukungan dari rakyat. Pengerahan massa seperti ini salah satunya pernah dilakukan oleh Fuad saat dirinya didera persoalan ijazah palsu dan sewaktu dirinya ditangkap oleh KPK. Sehingga kesan yang timbul dari adanya deukungan masif seperti itu adalah akan riskan terjadinya kegaduhan di tingkat bawah bila pemerintahan Fuad diusik oleh aparat penegak hukum.

> "..... Misalnya ya, salah satu contoh, setiap ada permasalahan-permasalahan, contoh misalnya dulu kasus ijazah ya, ketika kasus ijazah ini mau berlanjut, pak fuad ini kemudian meminta kira-kira ada puluhan kiai lah, untuk datang ke polda. Pak polda, saya

[17]Hasil Wawancara dengan Rofii, S.H. pada tanggal 29 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> minta kasus ini jangan dilanjut misalnya seperti itu, karena begini begini begini, nah inikan dalam rangka membangun opini ke tingkat penegak hukumlah paling gak bahwa soliditas dukungan di bawah ini betul-betul luar biasa, sehingga kalau ini dilanjut kasusnya akan terjadi sesuatu gerakan destruktif dan lain sebagainya .....”[18]

Sebetulnya secara implisit, dengan tidak adanya penegakan hukum terhadap penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Fuad Amin, akhirnya, masyarakat pun sama-sama tertipu. Karena dengan begitu, masyarakat merasa bahwa seleweng-lewengnya pemerintah Fuad, faktanya akan tetap mendapat perlindungan dari para penegak hukum. Dari pada memilih jalur konfrontasi dengan Fuad, maka lebih beruntung dia bersikap kooperatif terhadap pemerintahannya, sehingga preseden buruk bagi demokrasi lokal Bangkalan terlihat melalui pertukaran praktik yang saling menguntungkan atau adanya simbiosis mutualisme antara Fuad dengan para pendukungnya melalui manipulasi suara dan pembagian proyek-proyek pemerintah.

> “..... Nah, di atas ketika permasalahan yang nyata seperti ijazah ini kemudian tidak terungkap secara tuntuas, inikan menyebabkan masyarakat di bawah ini menjadi putus asa gitu. Wong kasus yang nyata seperti ini aja gak bisa, bagaimana dengan kasus yang lain. Berarti kalau begitu pak Fuad ini betul-betul sakti.Yah dari pada aku gak dapat apa-apa, mending ikut dukunglah, walaupun..., seperti itu.”[19]

Disamping munculnya loyalitas kepada Fuad karena adanya intimidasi dan mistis seperti takut kwalat karena Fuad adalah kiai dan

[18]Hasil Wawancara dengan Rofii, S.H. pada tanggal 29 Desember 2017.

[19]Hasil Wawancara dengan Rofii, S.H. pada tanggal 29 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cucu kiai besar, atau adanya praktik-praktik kekerasan yang Fuad lakukan, ada juga unsur penopang loyalitas lainnya, yaitu melalui pemberian bantuan-bantuan proyek-proyek yang Fuad berikan lepada orang-orangnya.

> "..... Kalau tadi itu untuk jaringan formalnya itu untuk menjadi eksekutor ya pelaksana, sementaradi jaringan informalnya ini dipermudah untuk menjadi penerima. Misalnya: anu ini program taruh di situ, atau kalau yang ngajukan itu orangku, ya udah kasih. Sementara nanti pekerjaannya siapa─ yang juga orang dia."[20]

Sebetulnya tanpa adanya imbalan materiil yang diterima oleh para kalangan kiai sekalipun, loyalitas mereka terhadap Fuad tidak akan surut. Sebab, dalam budaya para kiai di Bangkalan, mereka akan taat dan hormat pada kalangan kiai yang lebih sepuh sepeninggal almarhum Kiai Abdullah Sachal. Terlebih Fuad berasal dari strata sosial kalangan kiai keturunan Syaikhona Kholil.

> "gini, kalau urusan kiai-kiai itu beliau itu memang, pertama, ya kan ada dua mas budaya yang ada di para kiai itu kalau kepada sesepuhnya yang lebih sepuh itu sami'na wa ato'na. Itu kiai.Jadi sebetulnya tanpa harus dipelihara pun gitukan, kiai-kiai itu sudah banyak yang tunduk.Karena kiai Fuad ini emang kalau setelah Kiai Abdullah almarhum, paling sepuh mas di Bangkalan.Gitu. Terus yang kedua, memang tiada berani mas seperti itu para kiai. Kalau ada yang mau berbeda gitu ya, gak bisa berbeda kiai dengan beliau."[21]

Dengan dua baground yang melatarbelakangi fungsionalisme Fuad, sebagai bupati dan sekaligus sebagai kiai, acapkali Fuad menjadikannya sebagai alasan untuk mengaburkan perilaku koruptif yang

[20]Hasil Wawancara dengan Rofii, S.H. pada tanggal 29 Desember 2017.

[21]Hasil Wawancara dengan Rofii, S.H. pada tanggal 29 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fuad lakukan.Bahwa segala sumbangan yang orang lain berikan kepada dirinya, ketika Fuad berada di pendopo, itu dalam kapasitasnya sebagai kiai, bukan bupati.Sehingga uang yang diberikan kepadanya adalah sodaqoh.

> "Nah, apalagi yang ini, jadi pada waktu itu ada matin gitu kan, ada pondok pesantren yang disumbang oleh partai politik, jadi pak Fuad ini kalau urusan keagamaan itu kan memang semua ini sumbangan gitu. Alasan-alasannya apa yang disampaikan oleh dia, ini bukan uang korupsi ini bukan uang negara,ini sodaqoh gitu kan. Kalau saya dikasih uang oleh orang di pendopo itu kan saya bukan bupati, saya di rumah dinas, saya kiai, itu tempat saya. Enggak ada orang yang ngasih uang itu ke kantor (pendo), Kntor bupati itu kan, yang datang gak ada. Kan itu yang selalu disampaikan di media-media di khalayak umum."[22]

Kondisi yang menggambarkan adanya loyalitas mendalam yang ditunjukan oleh kalangan kiai yang begitu dekat dengan Fuad bahkan menjadi pertanyaan besar bagi kelompok oposisi khususnya Imam Bukhori.Dia merasa heran dengan sikap para loyalis Fuad yang tetap membelanya meskipun nyata-nyata Fuad telah melanggar aturan hukum negara, apalagi hukum agama.Jika Fuad masih menjadi penguasa, wajar jika loyalitas tersebut masih ada, karena mungkin ada banyak kepentingan-kepentingan di dalamnya.Tapi setelah Fuad tidak berkuasa, ditambah hasil muktamar NU yang tegas menyatakan bahwa koruptor tidak wajib dishalati dan dimandikan, nyatanya pembelaan tersebut masih tetap bertahan.

[22]Hasil Wawancara dengan Rofii, S.H. pada tanggal 29 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Dampak Respon Politik Pemuda terhadap Hegemoni Dinasti Politik Kaum Sarungan

Dalam politik hegemoni sistem (birokrasi) dimanipulasi dan dieksploitasi habis-habisan untuk memenuhi segala keinginan dan kepentingan penguasa. Sementara para aparatus dibayar untuk diam dan mediamkan dalam rangka melanggengkan kekuasaan hegemonik penguasa: bukan bekerja dengan tolok ukur yang riildan konkrit mewujudkan kesejahteraan sosial dalam bentuk idea yang dapat kita bayangkan. Jadi dalam politik hegemoni relasi antara penguasa dan aparatus birokrasi adalah analog dengan relasi antara patro dan klien, tuan dan hamba, majikan dan pembantu, juragan dan kacung. Karena eksploitasi adalah *paasword* kekuasaan maka tidak ada nilai dan norma yang betul-betul obyektif secara moal dalam politik hegemoni, melainkan dimanipulasi sedemikian rupa untuk menkondisikan sikap tunduk, manut, dan bungkam. Dengan instrumen inilah sebagian kecil manusia aparatus diformat untuk menjadi robot-robot hegemoni dan dalam banalitas kesadarannya bersedia menjadi buruh pion penguasan yang menindas dan mengeksploitasi massa rakyat.

Tidak ada tempat bagi kritisme dalam kekuasaan hegemonik. Manusia cerdas, berintegritas, kritis, memiliki sensitifitas sosial, dan selalu berorientasi pada tindakan adalah jenis manusia paling tidak diinginkan oleh politik hegemoni beserta sistem birokrasinya. Sebaliknya ia akan selalu memelihara jenis manusia-manusia confort zone lovers yang selalu manut dengan mengiyakan segalanyauntuk mendapatlan segalanya sebagai harga atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

imbalan atas sikap tunduknya, dan manusia-manusia yang sesungguhnya baik namun naif, luguh, tidak mau mikir mungkin karena terlalu berat atau tidak paham, ataupun sebailiknya faham dan juga prihatin namun tak kuasa melawan hingga akhirnya kalah di bawah jejaring penetrasi kuasa hegemoni. Realitas seperti itulah yang terjadi di Bangkalan yang sudah bertahan dan sampai berlarut-larut yang membuat muak para aktivis dan segenap kalangan pemuda yang berada di Bangkalan.

Dengan adanya kegiatan dan aktivitas yang dilakukan oleh kalangan pemuda dan para aktivis ─ yang sudah dipaparkan oleh penulis dalam bab II ─ maka lambat laun masyarakat Bangkalan sudah mulai terbuka dan tercerahkan dengan apa yang terjadi dalam birokrasi yang ada di Bangkalan. Diantaranya dalam pilkada kemaren masyarakat cukup cerdas dalam memilih pemimpinnya tanpa ada banyak intervensi dari kaum sarungan – bisa diminimalisir --. Dari kegiatan yang dilakukan LSM juga banyak yang membuat masyarakat jadi sadar terutama yang bergerak dalam ranah pengawasan dan advokasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Adanya desentralisasi yang kemudian terjewantahkan dalam pemilihan kepada daerah secara mandiri, telah membuka kesempatan bagi orang yang berpengaruh di tingkat lokal untuk memenangkan kontestasi yang diadakan di wilayahnya masing-masing.

Respon politik pemuda terhadap hegemoni dinasti politik kaum sarungan berupa edukasi politik dan advokasi yang diaktualisasikan dalam berbagai kegiatan dan sosialisasi. Hal ini dipengaruhi oleh latar belakang para politik pemuda yang berasal dari pendidikan pesantren yang *notabene* nya masih sangat ta'dim kepada guru alias kiai mereka, meskipun kiai tersebut terjun ke ranah politik bahkan yang melakukan tindak pidana sekalipun.

Dinasti politik kaum sarungan menjadi trah tak tergantikan dalam memimpin Bangkalan selama dua dekade. Ini semua tak lain dikarenakan fanatisme dan rasa *ta'dim* masyarakat Bangkalan kepada sosok kiai. Dinasti politik memang menjadi salah satu isu penting dalam studi politik dan sosiologi politik. Dinasti politik tidak sekedar terkait dominasi kekuasaan oleh seorang aktor politik yang mewariskan dan memproduksi kekuasaannya kepada keluarganya, tetapi juga terkait bagaimana kontruksi sosial masyarakat didesain dalam sebuah relasi sosial yang berkeadilan dan lebih humanis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Banyak masyarakat yang tersadarkan dari terbelenggunya dalam waktu yang bertahun-tahun lamanya dengan aktivitas-aktivitas selama ini yang dilakukan oleh para pemuda untuk merespon hegemoni dinasti yang dilakukan oleh para kaum sarungan.

B. Saran

Penelitian mengenai dinasti politik, yang dikhususkan bagi kaum sarungan di Bangkalan, memuat bberapa hal yang belum terurai. Karena terbatasnya waktu, penulis hanya melihat dari sisi hegemoninya saja, terhitung sejak tahun 2003 sampai 2012. Untuk itu, penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya menjelaskan bagaimana aspek-aspek dari sisi yang lain ikut mempengaruhi perspektif atau cara pandang masyarakat Bangkalan. Seperti misalnya dari aspek dominasi dalam hal ini penggunaan kekerasan fisik yang dilakukan oleh dinasti politik kaum sarungan. Karena dalam tinjauan singkat penulis di Bangkalan, sisi tersebut sedikit ataupun banyak ikut mempengaruhi jalannya politik di Bangkalan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdullah, Taufik, dan Rusli Karim. *Metode Penelitian Agama; Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1991.

_____. *Pemuda dan Perubahan Sosial*. Jakarta : Balai Pustaka, 2001.

_____. *Krisis Masa Kini dan Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.

Albertus, Doni Koesoema. *Pendidikan Karakter,Strategi Mendidik Anak di Zaman Global*. Jakarta: Grasindo, 2010.

Anaroga, Panji dan Sri Suyati. *Perilaku Keorganisasian*. Jakarta : Pustaka Jaya, 1995.

Apter, David. *Pengantar Analisa Politik*. Jakarta: Rajawali Press, 1985.

Aunillah, NurlaIsna. *Panduan Menerapkan Karakter di sekolah*.Yogyakarta: Laksan, 2011.

Azizah, Nurul. *Artikulasi Politik Santri: dari Kiai menjadi Bupati*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Azra, Azyumardi. 1996. *Pergolakan Politik Islam: dari Fundamentalisme, Modernisme, hingga Post-Modernisme*. Jakarta: Paramadina.

Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Bawani, Imam. *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam*. Surabaya: Al Ikhlas, 1993.

Ben Anderson. *Revolusi Pemu*da. Jakarta : PT Grapindo, 1997.

Budiardjo, Meriam. dkk. *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa*. Cet: I. Jakarta: Sinar harapan, 1984.

Dewanata, P., & Syaifullah, C. *Rekonstruksi Pemuda*. Jakarta: Kementerian Pemuda dan Olahraga, 2008.

Dhofier, Z. *Tradisi Pesantren: Studitentang Pandangan Hidup Kiai*. Jakarta: LP3ES, 1981.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Etzioni, Amitai. *Organisasi-Organisasi Modren.* Jakarta : Grapindo, 1999.

Fadillah, Putra. *Partai Politik dan Kebijakan Publik :Analisis Terhadap Kongruensi Janji Politik Partai dengan Realisasi Produk Kebijakan Publik di Indonesia.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Fatih, Syuhud A. *Santri, Pesantren, dan Tantangan Pendidikan Islam,* Malang: Pustaka Khoirot, 2008.

Gramsci, Antonio. *Catatan-catatan dari Penjara*. Terj. Teguh Wahyu Utomo.Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Haedari, Amin & Abdullah Hanif. *Masa Depan Pesantren dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Kompleksitas Global*. Jakarta : IRD Press, 2004.

Haraman, Abd. Malik, dkk. *Pemikiran-pemikiran Revolusioner.* Yogyakarta: Averroes, 2001.

Jones, Pip. *Pengantar Teori-teori Sosial*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.

Kansil,C.S.T, *Aku Pemuda Indonesia, Pendidikan Politik Generasi Muda*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.

Khamami, Zada. *Dinamika Ideologi dan Politik Kenegaraan Nahdlatul Ulama*. Jakarta: Kompas Media, 2010.

_____. *Standardisasi Lembaga Kepemudaan 2007*. Jakarta: Kemenpora, 2007.

Kemenpora. *Revitalisasi Organisasi Kepemudaan.* Jakarta: Kemenpora, 2010.

Kuntowijoyo. *Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris Madura 1850-1940*. Yogyakarta: Mata Bangsa, 1993.

Majid, Nurkholis. *Bilik-bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalana*. Jakarta: Paramadina, 1997.

Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.

Mutmainnah, Munir. *Kiai dan Dinamika Politik Lokal di Kabupaten Bangkalan dan Sumenep, Madura Dalam Desentralisasi, Globalisasidan Demokrasi Lokal*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Patoni, Achmad. *Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Patria, Nezar. *Antonio Gramsci Negara dan Hegemoni.*Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Rifai, Mien Ahmad. *Manusia Madura: Pembawaan, Perilaku, Etos Kerja. Penampilan. Dan Pandangan Hidupnya, seperti Dicitrakan Peribahasanya*. Jakarta: Pilar Media Anggota IKAPI, 2007.

Rozaki, Abdur. *Menabur Kharisma, Menuai Kuasa.* Yogyakarta: Genta Press, 2004.

_____. *Islam, Demokrasi, dan Orang KuatLokal: Studi Kemunculan Oligarki Politik dan Perlawanan Sosial di Bangkalan Madura.* Disertasi Program Studi Islam, UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Said. *Dinamika Pesantren dan Madrasah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Simon, Roger. *Gagasan-gagasan Politik Gramsc*. Terj. Kamdani dan Imam Baehaqi. Yogyakarta: Insist, 1999.

Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian.* Jakarta: Mitra Wacana Media, 1999.

Steenbrink, Karel. *Pesantren Madrasah Sekolah.* Jakarta: LP3ES, 1994.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D.* Bandung: Alfabeta, 2012.

Suprayogo, Imam. *Kiai Politik, Kiai Advokad,dan Kiai Spiritual.*Disertasi tidak dipublikasikan. Surabaya: Universitas Airlangga, 1998.

Synnot, Anthony. *Tubuh Sosial Simbolisme, Diri, dan Masyarakat*. Yogyakarta: Jalasutra, 2007.

Ummatin, Khoiru. *Perilaku Politik Kiai*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Widiyoko, dkk. *Bisnis Militer Mencari Legitimasi*. Jakarta: ICW, 2003.

Wahid,A. *Kiai Nyentrik Membela Pemerintah*. Yogyakarta: LkiS, 1997.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jurnal dan Majalah

Anwar, Hidayatulloh Bagus. 2016. *Ketahanan Politik Wilayah Pondok Pesantren dalam Pemilihan Umum 2014.*Jurnal Ketahanan Nasional Volume 22 no. 1, 27 April 2016.

Dinasti Tuhan Kedua di Bangkalan." *Majalah Detik*, edisi 161 (29 Desember 2014 – 4 Januari 2015).

Muhammad Kosim. "Kiai dan Blater: Elit Lokal dalam Masyarakat Madura". *Jurnal Karsa.*Vol. XII No. 2, Oktober, 2007.

Nofiaturrahmah, Fifi. 2014. *Melacak Peran Kyai-Santri dalam Politik Kebangsaan di Indonesia.* JIE Volume III No. 1 April 2014 M.

Sari, Hendro Fadli. 2015. *Perilaku Politik Eelit & Hubungan Kyai - Santri) Dukungan Politik Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang Terhadap Pilgub Jatim 2013.* EJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 4, Nomor 1, 2015.

Satiries, Wahyu Ishardino. 2009. *Peran Serta Pemudadalam Pembangunan Masyarakat*. Jurnal MADANI Edisi I/ Mei 2009.

Susanto, E. 2007. *Kepemimpinan (Khrismatik) Kiai dalam Presfektif Masyarakat Madura*. Jurnal KARSA, Vol. XI No. 1 April 2007.

Wahyu Ishardino Satries. *Peran serta Pemuda dalam Membangun Masyarakat.* Jurnal Madani Edisi I/Mei 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id